



LAPORAN KINERJA

**PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**TAHUN
2024**





Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin serta memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdatin untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat empat (4) Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, dua (2) secara semesteran, dan lima belas (15) secara tahunan. Terdapat satu indikator yang tidak mencapai target yaitu IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP.

Melalui capaian-capaian kinerja tahun 2024, Pusdatin mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain:

1. Penghargaan Bhumandala Award untuk 3 kategori, yaitu:
 - a. Bhumandala Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik mendapatkan Bhumandala Ariti/perunggu;
 - b. Bhumandala Nama Rupabumi mendapatkan Bhumandala Ariti/perunggu;
 - c. Bhumandala Simpul Jaringan mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu Bhumandala Kanaka/emas.
2. Penilaian kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan pada produk pelayanan administrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 memperoleh hasil 91,05 masuk pada zona Hijau dengan predikat kepatuhan Tinggi;
3. Mendapatkan penghargaan Terbaik Ke II atas penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Penghargaan dari Kementerian PANRB hanya diberikan untuk **10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga terbaik**, salah satunya KKP pada kegiatan Gebyar Pelayanan Prima 8 Oktober 2024 di Jakarta bertajuk "Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif";
5. KKP memperoleh predikat sebagai Pembina Inovasi Terbaik Instansi Pemerintah untuk Pemantauan Berkelanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Tahun 2024, sesuai dengan Surat Pengumuman Kementerian PAN RB Nomor B/442/PP.00.05/2024 tentang Hasil Penilaian *Desk* Evaluasi Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai **90,15 (Zona Hijau)** dengan kategori **A (Kualitas Tertinggi)** dari Ombudsman untuk Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, peringkat ke-4 dari 5 (lima) besar K/L.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2024 ini, dan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk triwulan berikutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan


Aulia Riza Farhan, S.T., M.Sci.Tech., Ph.D.
NIP. 197208122001121002

Ringkasan Eksekutif

Pusdatin dalam rencana kinerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Pada tahun 2024 Pusdatin memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja terdapat 4 (empat) indikator yang capaiannya dinilai secara triwulan, 2 (dua) indikator yang dinilai secara semesteran, dan 15 (lima belas) indikator yang dinilai secara tahunan.

Berdasarkan *Dashboard* aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), capaian kinerja Pusdatin Triwulan IV Tahun 2024 ditunjukkan dengan Skor Kinerja sebesar **107,88%**. Hasil analisis terhadap IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Pusdatin Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91	96,42	105,96
		2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen)	94	125,00	141,84
		3.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5	4,11	117,43
		4.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	76	98,95	130,20

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
		5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05	3,99	130,82
		6.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76	80,78	106,29
		7.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	90	100	111,11
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,50	3,40	120,00
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (persen)	70	89,17*	136,00
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3	3	100
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75	2,73	99,27
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59	4.8	104,58
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85	90,15	106,06
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30	91,47	103,59
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84	84,55	100,65
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	100	100	100

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusdatin (persen)	100	100	100
		18.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85	90,13	106,04
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	95	100	125,00
		20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen)	94	133,33	141,84
		21.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95	99,49	104,73

Keterangan: * Nilai tahun 2022 (dilakukan dua tahun sekali)





Gambar 1. Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan IV 2024

Realisasi Penyerapan DIPA Pusdatin per 31 Desember tahun 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI dari pagu senilai **Rp 108,164,748,000,-** telah direalisasikan senilai **Rp 107,611,105,172,-** dengan persentase realisasi anggaran adalah senilai **99,49%**, dengan sisa anggaran senilai **Rp 553,642,828,-** Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dan Blokir kode 2 (kurang Data Dukung) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan AA senilai **Rp 13.516.240.000,-** atau sebesar **11,11%** dari total pagu anggaran.

Melalui capaian-capaian kinerja tahun 2024, Pusdatin mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain:

1. Penghargaan Bhumandala Award untuk 3 kategori, yaitu:
 - a. Bhumandala Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik mendapatkan Bhumandala Ariti/perunggu;
 - b. Bhumandala Nama Rupabumi mendapatkan Bhumandala Ariti/perunggu;
 - c. Bhumandala Simpul Jaringan mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu Bhumandala Kanaka/emas.
2. Penilaian kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan pada produk pelayanan administrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 memperoleh hasil 91,05 masuk pada zona Hijau dengan predikat kepatuhan Tinggi;
3. Mendapatkan penghargaan Terbaik Ke II atas penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Penghargaan dari Kementerian PANRB hanya diberikan untuk **10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga terbaik**, salah satunya KKP pada kegiatan Gebyar Pelayanan Prima 8 Oktober 2024 di Jakarta bertajuk "Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif";
5. KKP memperoleh predikat sebagai Pembina Inovasi Terbaik Instansi Pemerintah untuk Pemantauan Berkelanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Tahun 2024, sesuai dengan Surat Pengumuman Kementerian PAN RB Nomor

B/442/PP.00.05/2024 tentang Hasil Penilaian *Desk* Evaluasi Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai **90,15 (Zona Hijau)** dengan kategori **A (Kualitas Tertinggi)** dari Ombudsman untuk Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, peringkat ke-4 dari 5 (lima) besar K/L.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan Tim SAKIP Pusdatin akan melakukan evaluasi capaian secara berkala serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.





Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	6
1.3 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
1.3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin.....	6
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin	11
1.3.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data, Statistik dan Informasi	12
1.3.4 Kelompok Jabatan Fungsional.....	16
1.4 Potensi.....	17
1.5 Permasalahan dan Tantangan	18
1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	19
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Sasaran Kegiatan	21
2.2 Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.....	22
2.3 Program dan Kegiatan.....	24
2.4 Tindak Lanjut Rekomendasi	25
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	32
3.2 Capaian Kinerja Anggaran	35
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja	39
3.3.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	40
3.3.2 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal.....	44

3.3.3 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	47
3.3.4 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	50
3.3.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP	53
3.3.6 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	57
3.3.7 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	62
3.3.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	64
3.3.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	70
3.3.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP	78
3.3.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP	82
3.3.12 Indeks Pelayanan Publik KKP	86
3.3.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	90
3.3.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP	94
3.3.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin	100
3.3.16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang- undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	104
3.3.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	106
3.3.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin	109
3.3.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	116
3.3.20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin	119
3.3.21 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin	121
3.4 Realisasi Anggaran	123
BAB 4 PENUTUP	126
4.1 Kesimpulan	126
4.2 Rencana Tindak Lanjut	128
LAMPIRAN	129

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Kinerja Pusdatin Tahun 2024.....	iii
Tabel 2. Tim Kerja Lingkup Pusdatin Tahun 2024	6
Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin	13
Tabel 4. Sebaran Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Pegawai Pusdatin.....	14
Tabel 5. Distribusi Pegawai Pusdatin	15
Tabel 6. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin	16
Tabel 7. Target Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2024	22
Tabel 8. Sasaran Strategis Pusdatin Tahun 2024	29
Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Tahun 2024	34
Tabel 10. Rencana Aksi Pusdatin Tahun 2024.....	35
Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP.....	41
Tabel 12. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP	41
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Setjen	45
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	47
Tabel 15. Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi.....	48
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi	51
Tabel 17. Capaian Persentase Layanan Sistem Informasi Tahun 2024	51
Tabel 18. Capaian Indeks SPBE KKP.....	54
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP	55
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik.....	57
Tabel 21. Capaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024.....	58
Tabel 22. Top 15 Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024	58
Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial	63
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	66
Tabel 25. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan	72
Tabel 26. Nilai Domain Indeks SDI.....	72

Tabel 27. Nilai Aspek Indeks SDI	73
Tabel 28. Rekomendasi Domain Kebijakan dan Kelembagaan Indeks SDI.....	74
Tabel 29. Rekomendasi Domain Penyelenggaraan SDI.....	75
Tabel 30. Rekomendasi Domain Domain Data Leadership SDI.....	77
Tabel 31. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP	78
Tabel 32. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP	83
Tabel 33. Capaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP Tahun 2024.....	84
Tabel 34. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Tahun 2024	87
Tabel 35. Capaian Indeks Pelayanan Publik KKP	88
Tabel 36. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	91
Tabel 37. Rincian Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	92
Tabel 38. Hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan IV Tahun 2024	94
Tabel 39. Hasil Nilai Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan IV Tahun 2024	95
Tabel 40. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP	95
Tabel 41. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat KKP Tahun 2024.....	98
Tabel 42. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat KKP Tahun 2023.....	99
Tabel 43. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin	101
Tabel 44. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin Tahun 2024.....	102
Tabel 45. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Setjen Tahun 2024	102
Tabel 46. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	105
Tabel 47. Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang- undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	106
Tabel 48. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK	107
Tabel 49. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Setjen Tahun 2024	108
Tabel 50. Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN).....	110
Tabel 51. Kualifikasi bobot nilai 25 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN).....	111
Tabel 52. Kualifikasi bobot nilai 40 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN).....	112
Tabel 53. Kualifikasi bobot nilai 30 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN).....	112

Tabel 54. Kualifikasi bobot nilai 5 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN).....	113
Tabel 55. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Tahun 2024.....	114
Tabel 56. Capaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Setjen Tahun 2024.....	115
Tabel 57. Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024.....	118
Tabel 58. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	118
Tabel 59. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Pusdatin Tahun 2024.....	120
Tabel 60. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Triwulan IV Tahun 2024	122
Tabel 61. Capaian Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran lingkup Setjenn Triwulan IV Tahun 2024.....	122
Tabel 62. Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Tahun 2024.....	124

Daftar Gambar

Gambar 1. Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan IV 2024.....	vi
Gambar 2. Struktur Organisasi Pusdatin TA 2024.....	11
Gambar 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Gambar 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan.....	14
Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang dan Pendidikan.....	14
Gambar 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	15
Gambar 7. Distribusi Pegawai Lingkup Pusdatin Berdasarkan Pendidikan.....	15
Gambar 8. Jumlah Jabatan Fungsional Berdasarkan Jenjang.....	17
Gambar 9. Skor Kinerja Pusdatin Triwulan IV Tahun 2024	33
Gambar 10. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Tahun 2024	33
Gambar 11. Validasi Nasional Semester I 2024	43
Gambar 12. Capaian Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen Tahun 2024.....	46
Gambar 13. Pengukuran Capaian Indikator MP Triwulan IV Tahun 202.....	46
Gambar 14. Sosialisasi aplikasi platform visualization and recognition	50
Gambar 15. Rapat Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	53
Gambar 16. Forum Kolaborasi SPBE 2024.....	56
Gambar 17. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Inovasi Pelayanan Publik	61
Gambar 18. Aspek Pengukuran dan Tingkat Kematangan Keamanan Siber.....	65
Gambar 19. Penilaian dan Verifikasi Cyber Security Maturity (CSM) 2024	66
Gambar 20. Hasil Penilaian dan Verifikasi Cyber Security Maturity (CSM) 2024.....	67
Gambar 21. Penghargaan KKP-CSIRT sebagai Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Sektor Pemerintah	69
Gambar 22. Capaian Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	73
Gambar 23. Hasil Evaluasi SPBE Tingkat Kementerian Tahun 2024.....	79
Gambar 24. Screenshot capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP pada aplikasi SIA-SPBE	81

Gambar 25. Koordinasi Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP.....	86
Gambar 26. Penghargaan PEKPPP Nasional dari Kementerian PANRB	89
Gambar 27. Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP Tahun 2024.....	92
Gambar 28. Validasi SKM TW IV Tahun 2024.....	97
Gambar 29. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	98
Gambar 30. Pedoman penggunaan aplikasi Si-Susan	100
Gambar 31. Rapat Penyiapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Monitoring Kinerja Individu	103
Gambar 32. Rapat Koordinasi Progsun Struktur Basis Data Penyakit Ikan dan Data Induk Penyakit Ikan	106
Gambar 33. Rapat Penyelesaian Temuan BPK	109
Gambar 34. Koordinasi Kolaborasi dan Evaluasi JF Prakom, Statistisi dan Surveyor Pemetaan Lingkup KKP.....	116
Gambar 35. Capaian Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen Tahun 2024.....	121
Gambar 36. Capaian Realisasi Anggaran Pusdatin Tahun 2024.....	125

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin) Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu dalam pengelolaan kinerja, merujuk juga pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pusdatin sebagai institusi yang mempunyai tugas memberikan layanan tentang informasi kelautan dan perikanan dituntut untuk selalu menyajikan data yang tepat waktu, akurat, lengkap dan berkelanjutan yang dibutuhkan oleh *stakeholders*, serta mendukung dan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020-2024.

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2024, sehingga menjadi periode penuntasan agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang yang belum terlaksana. Lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan



misi Nawacita Kedua dan pencapaian Visi Indonesia 2045, yaitu: 1.) pembangunan sumber daya manusia; 2.) pembangunan infrastruktur; 3.) penyederhanaan regulasi; 4.) penyederhanaan birokrasi; dan 5.) transformasi ekonomi.

Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut, terdiri atas: 1.) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2.) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3.) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 4.) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5.) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6.) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan 7.) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: 1.) “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”; 2.) “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”; 3.) “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan 4.) “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “RB KKP yang berkualitas”.

Adapun sasaran strategis (SS) dari pembangunan kelautan dan perikanan periode Tahun 2020-2024 adalah: SS-1 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan; SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat; SS-3 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat; SS-4 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab; SS-5 Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing; SS-6 Pengawasan dan



penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif; dan SS-7 RB KKP yang berkualitas.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020- 2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan program prioritas KKP.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan pencapaian target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs, KKP menempatkan ekologi sebagai panglima guna mendukung lompatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (ekonomi biru) yang dapat terus dirasakan manfaatnya oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Penerapan konsep ekonomi biru tersebut diterjemahkan sebagai pembangunan ramah lingkungan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan sumber daya yang memberikan nilai tambah. Selain itu, ekonomi biru juga diyakini mampu mendorong pengelolaan perikanan secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi. Untuk itu dibutuhkan penyediaan akses internet, teknologi informasi, dan instrumen pengawasan berbasis satelit yang dapat memonitor perubahan sumber daya kelautan dan perikanan secara cepat dan sensor bawah laut yang dapat mengirimkan data-data hasil observasi.

Arah dan kebijakan KKP tahun 2020-2024 menjadi: 1.) penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan yang dilakukan dengan cara memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan; 2.) pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan dan memperkuat tata kelola perikanan budi daya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat; 3.) pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan dan penjaminan kualitas mutu dan keamanan pangan, peningkatan nilai tambah serta pengelolaan sistem logistik yang efisien untuk meningkatkan investasi, perluasan pasar dalam negeri dan ekspor hasil kelautan dan perikanan; 4.) pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui perluasan kawasan konservasi perairan,



penyelenggaraan penataan ruang laut, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, rehabilitasi pulau-pulau kecil dan penanganan sampah plastik di pesisir dan laut, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan 5.) penguatan SDM aparatur serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Strategi yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan profesionalisme ASN, penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan KKP, peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP KKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

Dalam rangka percepatan implementasi arah kebijakan mendukung RPJMN, dan ekonomi biru tersebut, maka KKP perlu melakukan peningkatan teknologi untuk memperluas pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi seperti, pemanfaatan informasi berupa citra satelit yang didapat dari pengamatan satelit bumi. Pemanfaatan satelit bumi ini juga dapat dimanfaatkan secara luas untuk pemetaan tambak aktif dan tidak aktif, waktu panen tambak (produksi), pemetaan hutan bakau, pemetaan terumbu karang maupun degradasi garis pantai. Basis data yang memadai akan membantu KKP dalam mengembangkan pembuatan kebijakan berbasis bukti digital.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, meliputi: 1.) tujuan pembangunan berkelanjutan; 2.) gender; 3.) modal sosial budaya; dan 4.) transformasi digital.

Untuk mendukung arah dan kebijakan KKP 2020-2024, Pusdatin melakukan kegiatan transformasi digital dengan menyiapkan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup menyiapkan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, prasarana dan sarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis *web (on-line)*,



serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*, serta penyediaan dan berbagi pakai data kelautan dan perikanan secara digital. Selain itu pada tahun 2024 Pusdatin juga melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) yaitu teknologi dan informasi yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas berupa kegiatan digitalisasi perijinan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pelaksanaan Transformasi Digital RPJMN 2020–2024 meliputi:

1. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri, melalui **Harmonisasi kebijakan dan regulasi** untuk mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri; **Peningkatan kapasitas SDM TIK** yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; **Peningkatan literasi digital** masyarakat;
2. Adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dan lain-lain) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja, melalui: **pelaksanaan Satu Data** dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar dan dapat dibagipakaikan serta mendukung pelaksanaan operasional *command center* dan implementasi *collaboration office*.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perikanan Indonesia, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat dioperasikan secara terintegrasi dengan *existing system* yang ada di KKP saat ini. Pengembangan sistem ini menjadi langkah besar KKP dalam mengimplementasikan program percepatan pelaksanaan penangkapan ikan terukur dan pemantauan kegiatan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan



daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sistem ini akan diimplementasikan dalam sarana Pusat Kontrol Maritim (*Command Center*) yang dioperasikan oleh KKP. Selain itu pada tahun 2024 Pusdatin melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) yaitu teknologi dan informasi yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas berupa kegiatan digitalisasi perijinan.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Akuntabilitas Kinerja Pusdatin tahun 2024 yang mencakup pencapaian tugas pokok dan fungsi, sasaran strategis kegiatan/program, serta arah kebijakan yang ditetapkan.

1.3 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin

Sesuai dengan Surat Tugas Kapusdatin Nomor B.33221/SJ.7/KP.440/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, dan dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka telah ditetapkan Pusdatin memiliki 7 (tujuh) Tim Kerja, dengan uraian fungsi sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2. Tim Kerja Lingkup Pusdatin Tahun 2024

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
1.	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	Pemenuhan indeks pelayanan publik KKP;
		Tingkat kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	a. Dukungan pengelolaan pelayanan terpadu satu atap di lingkungan KKP



No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			b. Pelaksanaan dan pemenuhan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	a. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) dan b. Pelaksanaan pembangunan zona integrasi menuju WBK/WBBM
2.	Pengelolaan Data dan Statistik	Tingkat Kepatuhan Pengelola data Kelautan dan Perikanan (persen)	a. Melakukan standarisasi dan dan statistik, pengelompokan data, dan metodologi statistik, serta pengelolaan master data kelautan dan perikanan; b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi data statistik kelautan dan perikanan; c. Melakukan koordinasi, analisis, penyajian, penyebarluasan data kelautan dan perikanan; d. Penyusunan dan analisis data tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan; e. Melakukan monitoring dan evaluasi data kelautan dan perikanan.
		Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	a. Melakukan pengelolaan data kelautan dan perikanan mendukung implementasi Satu Data Indonesia; b. Melaksanakan tugas sebagai Walidata Kementerian Kelautan dan Perikanan. c. Melakukan pemenuhan tingkat maturitas satu data kelautan dan Derikanan
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	Melakukan pemenuhan indeks tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP



No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
3.	Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP dan Aplikasi Sistem Informasi	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP	a. Melakukan pemenuhan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP; b. Koordinasi pelaksanaan clearance anggaran teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP dengan instansi terkait; c. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan KKP
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP	Melakukan pemenuhan implementasi kebijakan arsitektur SPBE KKP.
		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkup KKP	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka evaluasi layanan aplikasi; b. Melakukan penyelenggaraan inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP; c. Melakukan monitoring dan evaluasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
		Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	a. Melakukan pemenuhan indeks layanan sistem dan teknologi informasi b. Melaksanakan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP.
		Persentase Unit Kerja Setjen yang menerapkan Sistem manajemen Pengetahuan yang Terstandar	c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam pemenuhan Persentase Unit Kerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar d. Pelaksanaan clearance anggaran teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP:
4.	Pengelolaan Kendali Maritim	Persentase Layanan Sistem Informasi Pengelola Kendali Maritim	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi merupakan sistem untuk menyediakan data dan informasi yang terpusat untuk



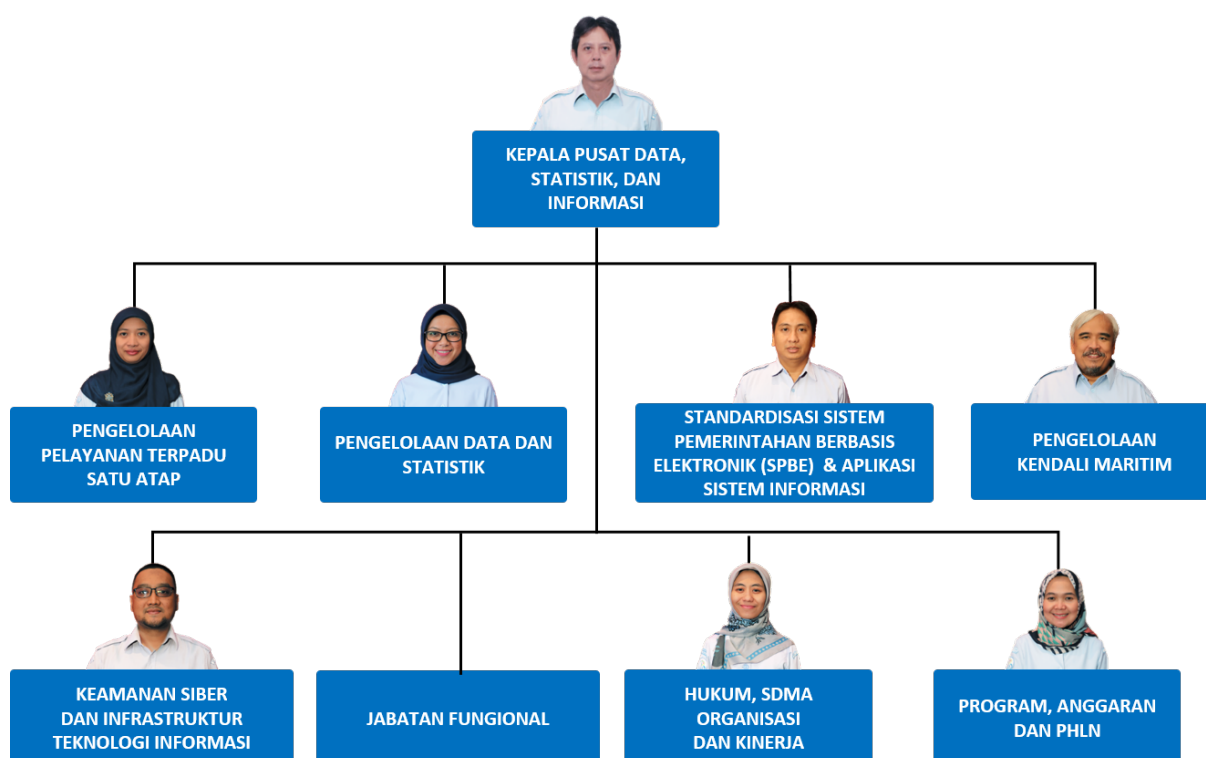
No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			dapat menggambarkan situasi secara <i>real time</i>; b. Melakukan pengelolaan data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; c. Melakukan visualisasi data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan hasil kajian dan analisis data untuk kebutuhan <i>decision support system</i>; d. Melakukan pengelolaan operasional dan pemeliharaan aset <i>command center</i> dan komputasi lingkup KKP; e. Melakukan integrasi sistem informasi pada unit kerja eselon I dan data citra berbasis satelit yang dimiliki oleh KKP f. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase layanan sistem informasi pengelolaan kendali maritim.
		Persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; b. Melakukan penyediaan sistem yang terintegrasi dan infrastruktur sistem satelit nano untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan fungsi kontrol, monitoring, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyediaan transponder dan sistem monitoring situasi maritim; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan integrasi dari beberapa sistem informasi dan unit kerja eselon I yang telah ada, serta data citra berbasis satelit yang dimiliki KKP.
5.	Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi	a. Melakukan kegiatan keamanan siber dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;



No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			b. Melakukan kegiatan pengelolaan <i>bandwidth</i> dan infrastruktur jaringan KKP pusat.
6.	Hukum, Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Kinerja	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusdatin	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan laporan kinerja, laporan tahunan, SAKIP.
		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengelolaan data statistik dan informasi KP. b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan draf Perjanjian kerjasama
		Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pusdatin; b. Melakukan pengelolaan layanan kearsipan dan persuratan;
7.	Program, Anggaran dan PHLN	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan PIPK.
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin.
		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin	Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase realisasi penyerapan anggaran Pusdatin;



No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan anggaran APBN/Pinjaman Hibah Luar Negeri; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait pengadaan barang dan jasa; c. Penyiapan laporan keuangan dan BMN, pencatatan BMN.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusdatin TA 2024

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusdatin menyelenggarakan fungsi :

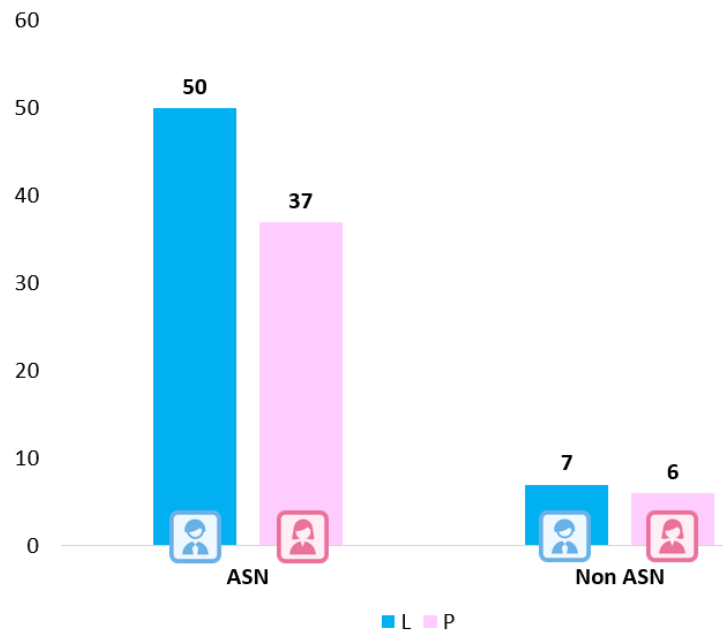
- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- d. koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standardisasi, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
- e. pengelolaan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
- g. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
- h. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusdatin; dan pelaksanaan urusan administrasi Pusdatin.

1.3.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data, Statistik dan Informasi

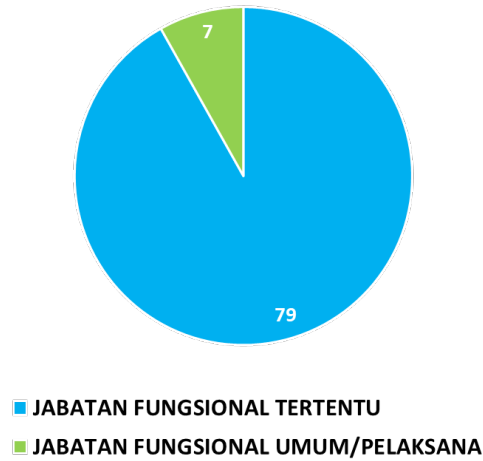
Dalam rangka mengemban tugas, Pusdatin didukung oleh 100 orang pegawai yang terdiri dari 87 ASN dan 13 Non ASN. Sedangkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sejumlah 79 orang dan 7 orang Pegawai Fungsional Umum (JFU), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	79
3.	Jabatan Fungsional Umum	7
4.	PPNPN/Non ASN	13
Total		100



Gambar 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

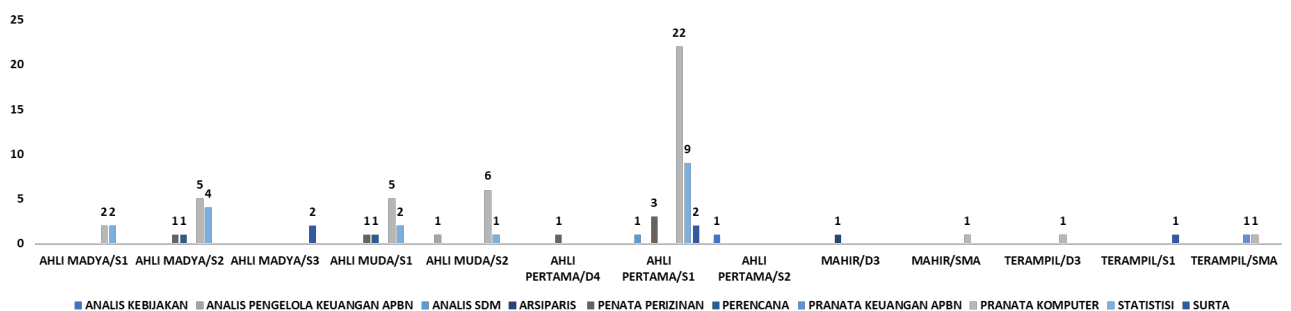


Gambar 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai ASN di Pusdatin mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini :

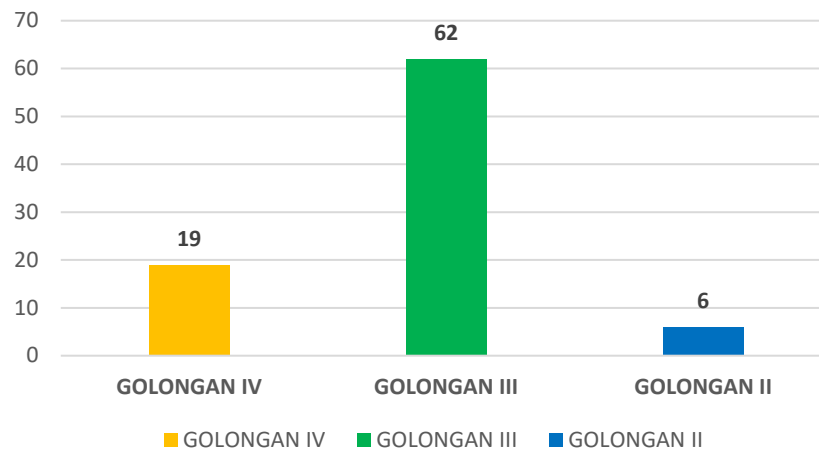
Tabel 4. Sebaran Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Pegawai Pusdatin

NAMA JABATAN/JENJANG JABATAN-PENDIDIKAN	AHLI MADYA/S1	AHLI MADYA/S2	AHLI MADYA/S3	AHLI MUDA/S1	AHLI MUDA/S2	AHLI PERTAMA/D4	AHLI PERTAMA/S1	AHLI PERTAMA/S2	MAHIR/D3	MAHIR/SM A	TERAMPIL/D3	TERAMPIL/S1	TERAMPIL/SMA
ANALIS KEBIJAKAN								1					
ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN					1								
ANALIS SDM							1						
ARSIPARIS									1				
PENATA PERIZINAN		1		1		1	3						
PERENCANA		1		1									
PRANATA KEUANGAN APBN													1
PRANATA KOMPUTER	2	5		5	6		22			1	1		1
STATISTISI	2	4		2	1		9						
SURTA			2				2					1	



Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang dan Pendidikan

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 19 orang golongan IV, 62 orang golongan III, dan 6 orang golongan II.

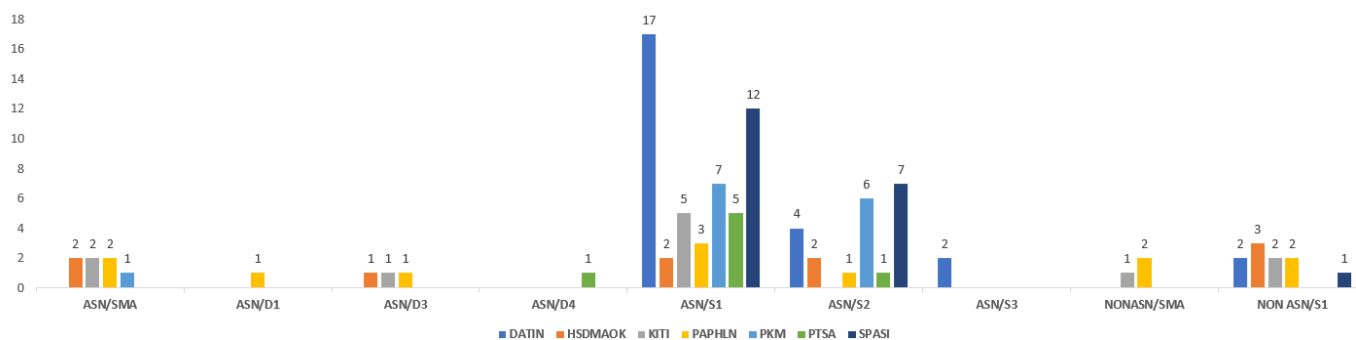


Gambar 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Distribusi aparatur Pusdatin baik Aparatur Sipil Negara maupun Non ASN sesuai dengan Jabatan Fungsional dan pendidikan pada Tim Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Distribusi Pegawai Pusdatin

TIM KERJA	ASN/SMA	ASN/D1	ASN/D3	ASN/D4	ASN/S1	ASN/S2	ASN/S3	NONASN/SMA	NON ASN/S1
DATIN					17	4	2		2
HSDMAOK	2		1		2	2			3
KITI	2		1		5			1	2
PAPHLN	2	1	1		3	1		2	2
PKM	1				7	6			
PTSA				1	5	1			
SPASI					12	7			1



Gambar 7. Distribusi Pegawai Lingkup Pusdatin Berdasarkan Pendidikan

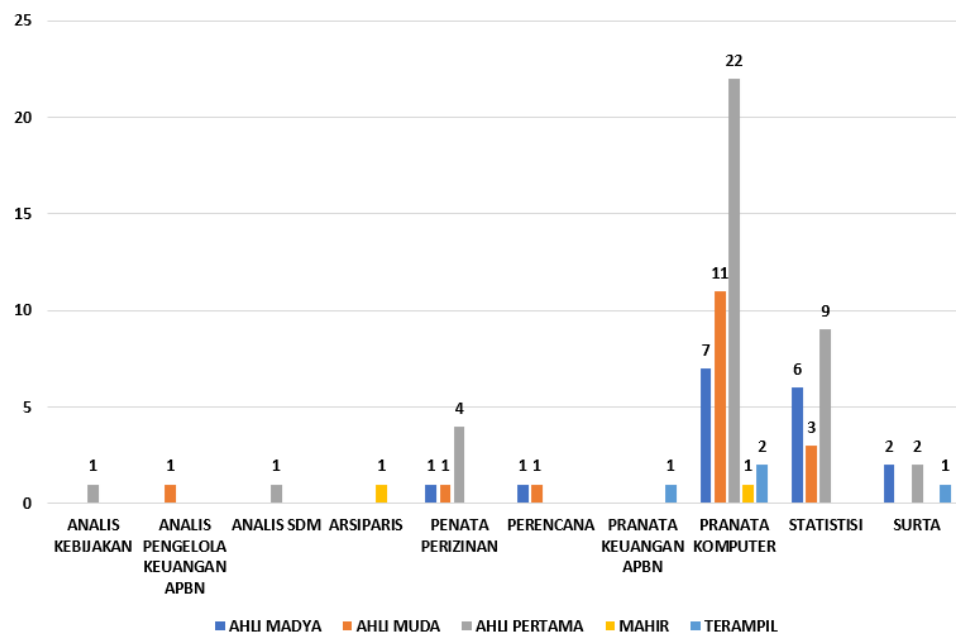
1.3.4 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusdatin mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Unit Kerja Pusdatin terdiri atas Pranata Komputer, Statistisi, Analis Kebijakan, Surveyor Pemetaan, Perencana, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Arsiparis, dan Penata Perijinan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Pusdatin Tahun 2024.

Tabel 6. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin

No.	Jenjang Jabatan Fungsional Lingkup Pusdatin	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)					Total
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Terampil	
1.	Analis Kebijakan			1			1
2.	Analis Pengelola Keuangan APBN		1				1
3.	Analis SDM			1			1
5.	Arsiparis				1		1
6.	Penata Perizinan	1	1	4			6
7.	Perencana	1	1				2
8.	Pranata Keuangan APBN					1	1
9.	Pranata Komputer	7	11	22	1	2	43
10.	Statistisi	6	3	9			18
11.	Surveyor Pemetaan	2		2		1	5
Total		17	17	39	2	4	79

Catatan : Termasuk Pejabat Transformasi dan PPPK



Gambar 8. Jumlah Jabatan Fungsional Berdasarkan Jenjang

1.4 Potensi

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Pusat Data, Statistik dan Informasi, untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh Pusat Data, Statistik dan Informasi antara lain:

1. Sumber Daya Manusia dengan jumlah 100 orang, sebagai Pranata Komputer 43 orang, Statistisi 18 Orang, 5 orang Surveyor Pemetaan, sisanya terdapat Jabatan Fungsional pendukung dan pelaksana.
2. BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dengan menekankan pada aspek strategis berupa pengelolaan data dan informasi sumber daya kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan melalui kegiatan akuisisi, pengolahan dan diseminasi data dalam bentuk data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Pada BPISDKP mempunyai citra satelit bumi yang berfungsi untuk memantau kondisi terkini dari kapal penangkap ikan dan kapal pengawas.
3. Ruang *Command Center* KKP, yang berfungsi menyajikan data secara *real time* dalam bentuk *dashboard* pemantauan.

4. Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), yang bertugas sebagai unit pengelola perijinan perikanan dan kelautan terpadu lingkup KKP.
5. Portal Satu Data KP, yang berfungsi menyajikan data statistik kelautan dan perikanan secara *real time* dalam bentuk *dashboard*.
6. Portal *Collaboration Office*, yang mempunyai fungsi sebagai portal korespondensi persuratan, dan administrasi pegawai.
7. Portal Bantuan Pemerintah, yang berfungsi menyajikan data bantuan KKP kepada pelaku usaha perikanan dan kelautan.

1.5 Permasalahan dan Tantangan

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang terbatas dibidang analisa data, analisa hukum, perancang undang-undang, dan analisa kerja sama;
2. Bagi Pakai Data antar K/L memerlukan PKS;
3. Renovasi dan pembaharuan sarana dan prasarana pada ruang layanan PTSA yang tertunda serta perlunya penambahan alokasi petugas khusus untuk *customer service* PTSA KKP;
4. Proses pengajuan *clearance* TIK KKP harus menginput proses bisnis *as-is* dan *to-be*. Kondisi saat ini proses bisnis *as-is* sudah terisi sedangkan proses bisnis *to-be* KKP belum ditetapkan. Hal tersebut membuat proses input *clearance* TIK tidak dapat dilanjutkan;
5. Banyaknya aplikasi yang menghasilkan database sendiri-sendiri, sehingga mengakibatkan sulitnya untuk menjadikan satu informasi yang lengkap dan komprehensif;
6. Belum tersedianya tim operasional Pengelola Keamanan Maritim dengan berbagai ragam jabatan fungsional lingkup eselon I KKP pada *command center* KKP;
7. Keterbatasan anggaran operasional Pengelola Keamanan Maritim selama 24 jam per 7 hari;



8. Belum adanya dashboard keamanan siber untuk melakukan monitoring terpusat terhadap keamanan sistem elektronik dan infrastruktur KKP dan melakukan mitigasi serangan siber;
9. Belum adanya kebijakan yang mengatur untuk pelaporan Pegawai mutasi/pensiun/pengunduran diri dan Pihak Ketiga/Vendor yang melakukan pengembangan aplikasi telah melakukan penyelesaian pekerjaan/mencapai akhir masa kontrak untuk menjadi acuan melakukan review hak akses VPN dan server;
10. Kolaborasi Tim CSIRT KKP masih belum optimal;
11. *Loan Agreement* dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan terkait dengan Penyediaan Insfrastruktur Sistem *Satellite Constellation Mission for Marine and Fisheries Resources* yang sampai dengan saat ini belum ditandatangani.

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja Pusdatin berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2023 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tujuan, organisasi, tugas pokok dan fungsi, potensi, permasalahan dan tantangan, serta sistematika penyusunan laporan kinerja.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar penjanjian kinerja Pusdatin yang telah dicapai dalam satu tahun, tindak lanjut rekomendasi



triwulan sebelumnya, keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusdatin.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

a. Capaian Kinerja Organisasi

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan periode yang sama tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya (dapat dilihat di SPAN/PMK 249);
- Analisa program/kinerja yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusdatin sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan rencana tindak lanjut pada tahun selanjutnya.



BAB2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah salah satu bagian dari perjanjian kinerja yang merupakan salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kegiatan dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Adapun tujuan Pusdatin adalah sebagai berikut :

1. mewujudkan penyajian data, statistik dan pelayanan informasi secara berkesinambungan;
2. mewujudkan sarana jaringan Sistem Informasi Manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pelayanan alur data maupun informasi secara mutakhir, tepat, cepat dan efisien;
3. mewujudkan Sistem Pemerintahan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi lingkup kementerian;
4. terciptanya SDM yang handal dalam sistem dan teknologi informasi serta pengolahan, penyajian dan analisa data statistik; dan
5. terwujudnya data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir guna mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka pada Tahun 2024 Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan”, dan



“Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi”.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

2.2 Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Pada tahun 2024 Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan”, dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi” serta diuraikan ke dalam 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama.

Penetapan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon I bagi Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II serta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Perjanjian Kinerja pejabat Eselon I. Perjanjian Kinerja Pusatin Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 7. Target Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2024
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91
		2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen)	94

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2024
		3.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		4.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	76
		5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05
		6.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76
		7.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	90
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,5
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai)	3
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	100
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100



Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
	18.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85
	19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	95
	20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen)	94
	21.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95

2.3 Program dan Kegiatan

Pusdatin merupakan unit Eselon II yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP, melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan, yaitu “Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”. Sejak Tahun Anggaran 2023, telah diimplementasikan kebijakan 1 (satu) DIPA pada masing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP, sedangkan DIPA Sekretariat Jenderal KKP dikelola di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Pusdatin yang merupakan unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal melaksanakan empat kegiatan dalam Rincian *Output* (RO). RO tersebut akan memenuhi Sasaran Kegiatan, yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan” dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi”.

Untuk mencapai sasaran tersebut dengan sejumlah target indikator sebagaimana tabel di atas, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2024 senilai **Rp 121,680,988,000,00**. Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut di atas dijabarkan kepada target kinerja tahunan dan triwulanan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Pusdatin Triwulanan dan Tahunan.



2.4 Tindak Lanjut Rekomendasi

Sub bab ini menginformasikan tindak lanjut dari rekomendasi pada triwulan sebelumnya, antara lain:

1. Pusdatin telah mengirimkan nota dinas penyampaian capaian input KUSUKA triwulan III tahun 2024 oleh penyuluh.
2. Pusdatin, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan Satminkal telah melakukan pemutakhiran *username* penyuluh yang pindah dan penyuluh yang sudah pensiun.
3. Pusdatin dan Sekretariat BPPSDMKP telah berkoordinasi lebih lanjut terkait sistem informasi penyuluh.
4. Telah diselenggarakannya Validasi Nasional Semester I pada Bulan Oktober 2024
5. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Validator Pusat dan Validator Daerah untuk segera memvalidasi data-data yang telah masuk
6. Telah melakukan penilaian bidang data geospasial lingkup KKP pada Oktober 2024
7. Telah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan *Portal Collaboration Office*
8. Telah melakukan evaluasi penginputan SIA SPBE V2
9. Melaksanakan Forum Kolaborasi Sistem Informasi
10. Melakukan sosialisasi implemetansi portal di beberapa UPT KKP
11. Sosialisasi implemetansi portal di beberapa UPT KKP
12. Melakukan Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Lingkungan KKP
13. Telah dilaksanakan kegiatan Digitalisasi Perizinan, dengan beberapa rapat koordinasi bersama *stakeholder* termasuk Eselon I pengampu aplikasi yang terlibat dalam data master kapal, data master perizinan, data KUSUKA, data produksi, data Validasi Nasional dan lainnya
14. Telah dilaksanakan penilaian SPBE pada 4 domain, yaitu: Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan
15. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi arsitektur SPBE di lingkungan KKP



16. Telah melakukan koordinasi pelaksanaan *clearance* anggaran teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP dengan instansi terkait
17. Penyusunan kebijakan SMKI dan Manajemen SPBE
18. Pelaksanaan penginputan SIA SPBE
19. Telah dilakukan evaluasi kegiatan atas rangkaian penilaian KIPP untuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025
20. Telah melakukan pengawalan pada beberapa penilaian diantaranya:
 - Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi oleh Kementerian PANRB, penilaiannya telah selesai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Instansi Pembina Inovasi Terbaik tahun 2024, untuk inovasi yang lolos sampai tahap wawancara adalah inovasi Pugar dari Direktorat Jasa Kelautan;
 - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian PANRB dengan lokus BPSPL Pontianak, saat ini penilaian sudah sampai pada tahap penyampaian dokumen dan akan mulai dievaluasi secara langsung;
 - Penilaian Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan dengan 5 lokus yaitu: Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang, DJPKRL, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, DJPT, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, DJPT, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, DJPB, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, DJPSDKP. Sosialisasi telah dilakukan oleh Kementerian PANRB secara *online*.
21. Telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BPISDKP Triwulan III tahun 2024
22. Telah melakukan evaluasi hasil asesmen Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP yang dilakukan oleh BSSN
23. Telah melakukan koordinasi dalam rangka perbaikan Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP
24. Telah dilaksanakan penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber (*Cyber Security Maturity*) pada Oktober 2024
25. Telah melakukan *review* pengisian SIA SPBE V2 dengan Kementerian PAN dan RB



26. Telah melakukan pendataan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan pada Lokasi sampling, antara lain Jawa Barat dan Jawa Tengah
27. Telah melakukan pendataan produksi Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap
28. Telah melaksanakan kegiatan reviu terhadap domain dan indikator dalam EPSS
29. Telah melaporkan hasil evaluasi PEKPPP kepada Sekretaris Jenderal KKP
30. Telah berkoordinasi dengan Lokus UPP untuk menindaklanjuti rekomendasi yang akan diberikan oleh Ombudsman RI berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP
31. Telah melaporkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP Tahun 2024
32. Telah menghimpun data dan laporan pelaksanaan SKM per UPP periode tahun 2024 sebagai bahan pelaporan kepada Kementerian PANRB
33. Telah menyampaikan daftar UPP yang tidak memiliki responden SKM kepada Sekretariat Eselon I sebagai bahan evaluasi Unit Kerja
34. Telah menyusun pedoman penggunaan aplikasi Si-Susan per level pengguna
35. Telah menyelenggarakan pelatihan/Bimtek dan seminar secara daring secara kontinyu berdasarkan kompetensi dan kebutuhan
36. Telah mengusulkan diklat fungsional untuk pejabat fungsional kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP
37. Telah mengumpulkan dan menginput data dukung dari masing-masing pejabat dan pelaksana untuk meningkatkan nilai kompetensi SDM di lingkup Pusdatin
38. Telah melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur.





2.5 Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024, Rencana Kerja 2024, dan Perjanjian Kinerja 2024

Akuntabilitas Kinerja organisasi Sekretariat Jenderal merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sekretariat Jenderal Tahun 2019 sebesar 108,88%, dihasilkan dari Nilai Kinerja *Perspektif Customer* sebesar 36,85%, *Perspektif Internal Process* sebesar 36,44% dan *Perspektif Learn and Growth* sebesar 35,59%. Dari 18 Sasaran strategis, terdapat 2 Sasaran strategis yang memiliki nilai dibawah 100%, yaitu: Terwujudnya Birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima (NSS 97,70), dan Terwujudnya ASN SETJEN yang kompeten, profesional dan berintegritas (NSS 90,46).

Pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024, Pusat Data Statistik dan Informasi, berkontribusi pada Sasaran Strategis dan indikator kinerja, yaitu:

1. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses dengan indikator kinerja persentase unit kerja KKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar;
2. Tersedianya data statistik informasi KP yang valid, handal dan mudah diakses dengan indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan data;
3. Terintegrasinya sistem informasi KKP dengan indikator kinerja nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja diatas, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pusdatin, dan rencana kerja Pusdatin yang tertuang pada kegiatan-kegiatan pada RKAKL Tahun Anggaran 2024.

Tabel 8. Sasaran Strategis Pusdatin Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Kegiatan
1.	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan	Validasi Nasional
		Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	Sinkronisasi dan Koordinasi Manajemen Pengetahuan
		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen	Sinkronisasi dan Koordinasi Manajemen Pengetahuan Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan
		Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	Penyelenggaraan Pusat Kontrol Maritime dan Infrastruktur Teknologi Informasi

		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	Penyelenggaraan SPBE KKP
		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	Sosialisasi Pedoman Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP
		Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<i>Satellite Constellation Mission For Marine and Fisheries Resources</i>
		Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Siber dan Data <i>Analitic</i>
		Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Statistik
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	Koordinasi Penyusunan Dokumen Reviu dan Kebijakan Internal SPBE
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP	Pengolahan Data dan Statistik
		Indeks Pelayanan Publik KKP	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	Penyusunan Standar Layanan Perizinan Terpadu
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	Monev Layanan Perizinan Terpadu



2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin	Penyelenggaraan Pengelolaan Kinerja Pusdatin
		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundangundangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	Penyempurnaan Peraturan dan Perjanjian Kerjasama Data, Statistik dan Informasi
		Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	Penatausahaan Keuangan
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdatin	Peningkatan Kualitas SDM (Sertifikasi)
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	Penatausahaan Keuangan
		Persentase Unit Kerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	Sinkronisasi dan Koordinasi Manajemen Pengetahuan Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan
		Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin	Penatausahaan Keuangan



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP, yang diturunkan melalui visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP. Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada tahun 2020-2024 Sekretariat Jenderal menetapkan visi yaitu Penggerak Utama Tatakelola Pemerintahan yang Baik menuju terwujudnya Visi KKP Sekretariat Jenderal sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP. Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, maka misi yang ditetapkan adalah: 1. Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen; dan 2. Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

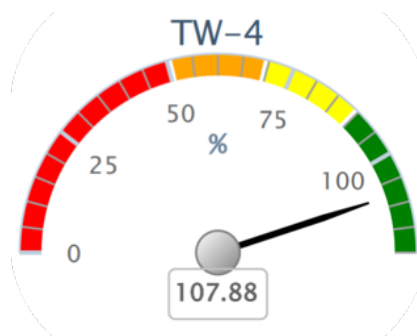
Tujuan beserta indikatornya dalam rangka menjabarkan dan mewujudkan misi Sekretariat Jenderal KKP adalah: 1. Meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP dengan indikator : Indeks Profesional ASN, Indeks sistem merit, Indeks pengelolaan keuangan, Indeks pengelolaan aset, Indeks perencanaan, Indeks kearsipan, Nilai SPBE KKP; 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan KKP, dengan indikator: Meningkatnya nilai kinerja RB KKP, Nilai SAKIP KKP, dan nilai PMPRB Setjen. Pusdatin mendukung visi dan misi Setjen melalui kegiatan yang mendukung peningkatan nilai SPBE KKP.

Analisis capaian kinerja tahun 2024 mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pusdatin, antara lain melaksanakan penyediaan data dan statistik, pengelolaan

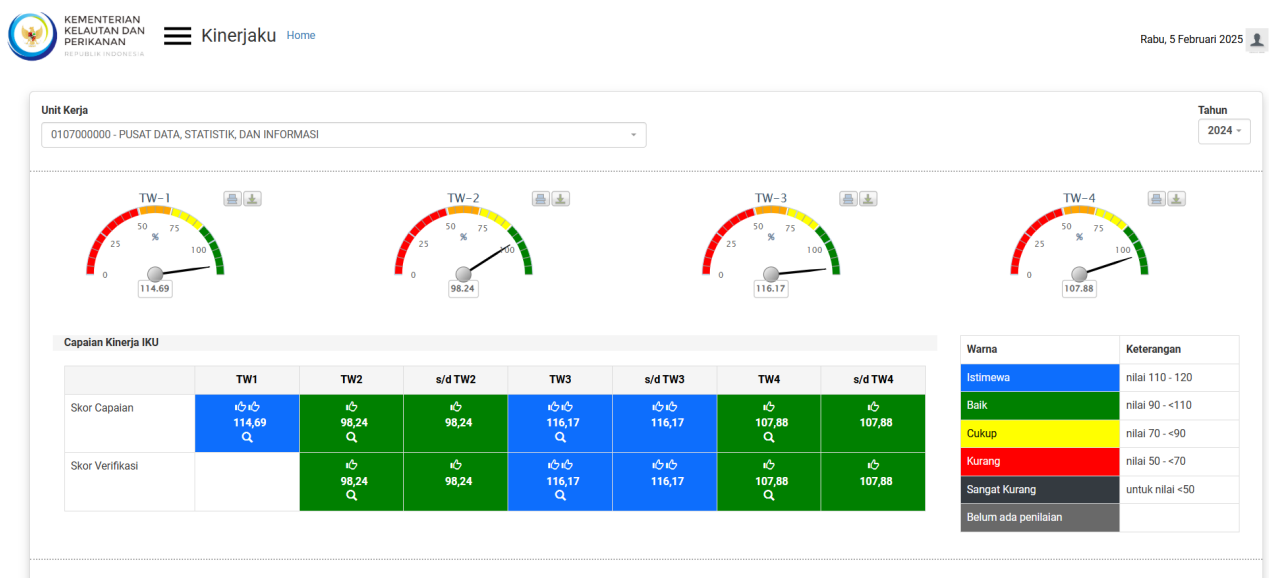


SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas keamanan infrastruktur teknologi informasi di bidang kelautan dan perikanan, serta pelayanan ketatausahaan dan perizinan terpadu.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Pusat Data, Statistik dan Informasi menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu *www.kinerjaku.kkp.go.id*. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Adapun capaian kinerja IKU Pusdatin periode Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku dengan nilai **107.88%**, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 9. Skor Kinerja Pusdatin Triwulan IV Tahun 2024



Gambar 10. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Pusdatin dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi TW IV	Capaian (%)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91	96,42	105,96
		2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen)	94	125,00	132,98
		3.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5	4,11	117,43
		4.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	76	98,95	130,20
		5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05	3,99	130,82
		6.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76	80,78	106,29
		7.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	90	100	111,11
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,5	3,40	136,00
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70	89,17	127,39
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai)	3	3	100
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75	2,73	99,27
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59	4,8	104,58



Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi TW IV	Capaian (%)
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85	90,15	106,06
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30	91,47	103,59
		15.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84	84,55	100,65
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	100	100	100
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100	100	100
		18.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85	90,13	106,04
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	95	100	125
		20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen)	94	133,33	141,84
		21.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95	99,49	104,73

1.2 Capaian Kinerja Anggaran

Dalam melaksanakan capaian kinerja, perlu dukungan anggaran, berikut disampaikan, capaian kinerja anggaran Pusdatin tahun anggaran 2024, yang dituangkan dalam rencana aksi.



Tabel 10. Rencana Aksi Pusdatin Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Kegiatan	Output/Komponen Pendukung Dalam RKAKL	Anggaran/Pagu (Rp 000)	Realisasi
SK 1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	IKU 1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91	Validasi Nasional	Laporan Validasi Nasional Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	403.480.000	403.301.027
			Persentase Unit Kerja Sekretariat Jenderal yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94	Sinkronisasi dan Koordinasi Manajemen Pengetahuan	Laporan Sinkronisasi dan Koordinasi Manajemen Pengetahuan	101.664.000	97.890.277
		IKU 2	Persentase Unit Kerja Sekretariat Jenderal yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94	Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan	Laporan Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan	35.320.000	35.248.850
			Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5	Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Sistem Informasi	Laporan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi KP	357.100.000	354.952.846
		IKU 3	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5	Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Sistem Informasi	Laporan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi KP	357.100.000	354.952.846
		IKU 4	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	76	Penyelenggaraan Pusat Kontrol Maritim dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Laporan Pusat Kontrol Maritim dan Infrastruktur Teknologi Informasi	2.981.040.000	2.924.513.988
		IKU 5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05	Penyelenggaraan SPBE KKP	Laporan Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	131.410.000	130.210.777



					Sosialisasi Pedoman Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Laporan Sosialisasi Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP	123,760,000	121.637.774
		IKU 6	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76	Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP	Berita Acara Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP	249.360.000	246.023.320
		IKU 7	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	76	<i>Satellite Constellation Mission For Marine and Fisheries Resources</i>	Laporan Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.981.040.000	2.836.284.806
		IKU 8	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,5	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Siber dan Data Analitic	Laporan Keamanan Siber dan Data Analitic	876,865,000	836,226,368
		IKU 9	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70	Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Statistik	Laporan Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	541,272,000	540,510,117
		IKU 10	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Reviu dan Kebijakan Internal SPBE	Laporan Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP	131.410.000	130.210.777



SK 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data, Statistik, dan Informasi	IKU 11	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75	Pengolahan Data dan Statistik	Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP		
		IKU 12	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap	Laporan Pelayanan Terpadu Satu Atap	181,872,000	179.534.850
		IKU 13	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85	Penyusunan Standar Layanan Perizinan Terpadu	Laporan Standar Layanan Perizinan Terpadu	143,590,000	140,380,610
		IKU 14	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30	Monev Layanan Perizinan Terpadu	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	186,540,000	169.692.042
		IKU 15	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84	Penyelenggaraan Pengelolaan Kinerja Pusdatin	Laporan Kinerja, Laporan Tahunan	333,298,000	329,854,272
		IKU 16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)	100	Penyempurnaan Peraturan dan Perjanjian Kerjasama Data, Statistik dan Informasi	Laporan Peraturan-peraturan Pusdatin	464,396,000	451.821.191
		IKU 17	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100	Penatausahaan Keuangan	Laporan SPIP, BMN, SAI	2,568,855,000	2.534.225.406



		IKU 18	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85	Peningkatan Kualitas SDM (Sertifikasi)	Laporan Kepegawaian dan SKP	207,927,000	204,954,095
		IKU 19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	80	Penatausahaan Keuangan	Laporan Program Kerja		
		IKU 20	Persentase Unit Kerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94	Sinkronisasi dan Koordinasi Manajemen Pengetahuan	Laporan Sinkronisasi dan Koordinasi Manajemen Pengetahuan		
					Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan	Laporan Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan		
		IKU 21	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95	Penatausahaan Keuangan	Laporan Keuangan		

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Realisasi dan capaian kinerja Pusdatin Tahun 2024 berdasarkan PK yang telah ditetapkan, sebagai berikut:



3.3.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Eselon II lingkup KKP (Setditjen) terkait yang menangani data produksi perikanan. Terdapat 3 (tiga) variabel perhitungan yang digunakan untuk evaluasi TKPD, yaitu :

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (Variabel X_1), Bobot Nilai 30%

Dihitung berdasarkan jumlah KUSUKA yang telah valid pada setiap Unit Kerja Eselon I pada laman Satu Data KKP, dengan rumus :

$$\sum \text{KUSUKA} = (\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid} / \text{Total Target}) \times 100$$

2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (Variabel X_2), Bobot Nilai 40%

Merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap sampling yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas Validasi Nasional pada aplikasi validasi nasional *desktop* dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.

3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (Variabel X_3), Bobot Nilai 30%

Merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh Unit Data Eselon I. Hasil pengukuran hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Penilaian dihitung terhadap capaian kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Nilai per eselon 1} = (\text{jumlah rencana aksi yang diselesaikan} / \text{total kegiatan berdasarkan rencana aksi}) \times 100$$

Sehingga perhitungan persentase TKPD Kelautan dan Perikanan, dengan rumus:

$$\text{Persentase TKPD} = \text{Variabel } X_1 + \text{Variabel } X_2 + \text{Variabel } X_3$$

Adapun Kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Tidak Patuh, jika nilai TKPD 0% - 25%
2. Cukup Patuh, jika nilai TKPD 26% - 50%
3. Patuh, jika nilai TKPD 51% - 75%
4. Sangat Patuh, jika nilai TKPD 76% - 100%

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan												
Nama IKU	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP (%)												
REALISASI					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-TW IV 2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
65,89	88,50	81,40	87,08	99,01	91	96,42	105,96	4,05	91	105,96	90,2	101,49	

Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan. Berdasarkan Nota Dinas No. 222/SJ.7/TU.210/I/2025 dengan perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Mandatory Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan di Lingkungan KKP Tahun 2024, capaian IKU TKPD pada Tahun 2024 sebesar **96,42%**.

Tabel 12. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP

Eselon I	KUSUKA (Pelaku Usaha)				Data Produksi yg Tervalidasi (%)				Data Geospasial yg Terintegrasi (%)				Capaian IKU
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bobot (%)	
DJPT	160.000	129.080	80,68	24,20	100	100	100	40,00	100	100	100	30,00	94,20
DJPB	55.000	123.691	224,89	30,00	100	100	100	40,00	100	100	100	30,00	100,00
DJPKRL	3.400	2.433	71,56	21,47	100	100	100	40,00	100	100	100	30,00	91,47
DJPDSPKP	10.467	26.012	248,51	30,00	100	100	100	40,00	Tidak ada target				100,00
Capaian IKU TKPD Tahun 2024													96,42

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU TKPD Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan Validasi Nasional Semester I Tahun 2024 dengan Eselon I dan Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi Capaian Pendataan Kusuka oleh Penyuluh Perikanan Triwulan IV 2024;
3. Melakukan monitoring realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi dalam Informasi Geospasial Tematik (IGT) pada Oktober 2024;
4. Pusdatin telah mengirimkan nota dinas penyampaian capaian input KUSUKA triwulan IV tahun 2024 oleh penyuluh;
5. Pusdatin dan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan Satminkal telah melakukan pemutakhiran username penyuluh yang pindah dan penyuluh yang sudah pensiun;
6. Pusdatin dan Sekretariat BPPSDMKP perlu koordinasi lebih lanjut terkait sistem informasi penyuluh;
7. Pada triwulan III Tahun 2024 terjadi penambahan total pelaku usaha sebanyak 105.725 pelaku usaha atau mengalami kenaikan sebesar 43,22% dibandingkan triwulan III Tahun 2023;
8. Estimasi total volume produksi perikanan triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 6,44 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 2,02 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 4,42 juta ton. Produksi perikanan triwulan III Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,52% dibandingkan dengan angka sementara produksi perikanan triwulan III Tahun 2023 (*year-on-year*);
9. Telah diselesaikan oleh PT Bagus Harapan Tritunggal seluruh kegiatan pembangunan platform portal dan big data engine digitalisasi perizinan terdiri dari 12 modul, terdiri dari: Kusuka, Produksi, Validasi Nasional, Pengawasan, Bantuan Pemerintah, Satu Peta, Media Analitik, Kinerja, Big Data, Perizinan, *User Management*, dan Pendanaan Inovatif. Platform tersebut dapat diakses pada <https://portaldata.kkp.go.id>;



10. Platform <https://portaldata.kkp.go.id> tersebut menyajikan data publikasi statistik dan spasial dilengkapi standar data dan metadata yang dapat diakses publik;
11. Terkait Progress Pengembangan Aplikasi Satu Data Modul Kusuka, sarana prasarana pelaku usaha lebih dari satu beserta statusnya akan ditampilkan pada dashboard;
12. Terkait dengan pengelolaan dan penyediaan data dan statisik, telah dilaksanakan Forum Satu Data pada tanggal 19-20 Desember 2024.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan/tahun selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan Validasi Nasional Semester II tahun 2024 pada Bulan Mei/Juni 2025;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Validator Pusat dan Validator Daerah untuk segera memvalidasi data-data yang telah masuk;
3. Melakukan penilaian terhadap tingkat Kematangan Informasi Geospasial Tematik KKP yang terjamin kualitasnya lingkup Eselon I pada tahun 2025.



Gambar 11. Validasi Nasional Semester I 2024

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan, Pusdatin melaksanakan kegiatan Validasi

Nasional dengan anggaran senilai Rp 403.301.027,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 403.301.021 atau 99,98%.

3.3.2 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh Pemerintah ataupun Swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. IKU ini merupakan indikator yang mengukur pemanfaatan teknologi informasi dengan penilaian aspek keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin *upload* keaktifan dan maksimal 4 poin keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pembobotan yang dimaksud antara lain adalah :

1. Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5HW1 dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5;
2. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1;
3. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Cara pengukuran :

1. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*Collaboration Office*);
2. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :
 - a. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin *upload* keaktifan dan maksimal 4 poin *upload* keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan;
 - b. Pengukuran Level I dihitung dengan lingkup pejabat pusat Eselon II;

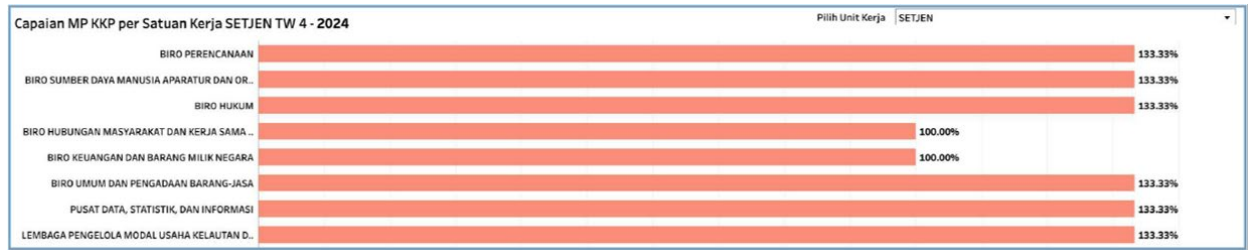
- c. Poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan;
- d. Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Pengukuran capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen pada Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Setjen

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen (%)											
REALISASI					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
91,14	96,06	95,59	98,32	112,59	94	125	132,98	-11,95	94	132,98	95	131,57

Dari Tabel dapat dilihat bahwa realisasi Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen pada Tahun 2024 adalah 125,00%, yang menunjukkan bahwa capaian sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%. Hal ini dapat dicapai karena sebagian besar Pejabat di Level I dan II aktif dalam melakukan *sharing* informasi capaian kinerja masing-masing unit kerja. Realisasi Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2023 adalah 133,33, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 kenaikannya adalah -11,95% dikarenakan menurunnya capaian MP pada lingkup Setjen. Dari grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa capaian semua Unit Kerja lingkup Setjen.



Gambar 12. Capaian Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen Tahun 2024



Gambar 13. Pengukuran Capaian Indikator MP Triwulan IV Tahun 202

Tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan *Portal Collaboration Office* menu *Manajemen Pengetahuan*;
2. Sosialisasi implemetansi Portal di beberapa UPT KKP.

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Unit Kerja Sekretariat Jenderal yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar yaitu kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan dengan anggaran senilai Rp 35.320.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 35.248.850,- atau 99,80%.

3.3.3 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Survei kepuasan layanan aplikasi sangat penting karena dapat memberikan masukan dari pengguna, sehingga Pusdatin dapat melakukan perbaikan yang relevan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Ini dapat membantu menjaga pengguna tetap terlibat dan setia terhadap aplikasi. Survei kepuasan juga dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana fitur dan fungsi tertentu berhasil atau tidak.

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian indeks ini maka penilaian diukur dengan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, 2 untuk jawaban tidak setuju, 3 untuk jawaban biasa saja/netral, 4 untuk jawaban setuju, dan 5 untuk jawaban sangat setuju. Kriteria persepsi terhadap penilaian adalah sebagaimana dapat sebagai berikut:

Nilai 4,5 – 5 : Memuaskan

Nilai 4 – 4,5 : Sangat Baik

Nilai 3 – 3,9 : Baik

Nilai 2 – 2,9 : Cukup

Nilai < 1,9 : Kurang

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi												
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Targ et 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
-	-	-	-	4,18	3,5	4,11	117,43	12,93	3,5	117,43	3,5	117,43	

IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan. Metode yang digunakan dalam survei adalah metode

kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner melalui aplikasi. Layanan yang menjadi objek survei adalah layanan aplikasi *Portal Collaboration Office*. Layanan ini merupakan layanan administrasi perkantoran/administrasi pegawai terintegrasi di KKP. Berdasarkan hasil deskriptif persepsi responden terhadap layanan aplikasi Portal *Collaboration*, rata-rata yang diperoleh adalah 4,11 dengan kategori Sangat Baik. Terdapat 4 (empat) variabel dengan hasil Sangat Baik dan 1 (satu) variabel Baik. Rincian hasil penilaian tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 15. Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

No	Pertanyaan	Rata-Rata Nilai	Keterangan
1.	<i>Portal Collaboration Office</i> dapat diakses dengan baik pada penjelajah (<i>browser</i>) saya	4,19	Sangat Baik
2.	Akses login <i>Portal Collaboration Office</i> memiliki tingkat keamanan yang baik	4,11	Sangat Baik
3.	<i>Portal Collaboration Office</i> dapat diakses setiap hari	4,28	Sangat Baik
4.	<i>Portal Collaboration Office</i> mudah digunakan	3,97	Sangat Baik
5.	Informasi pada <i>Portal Collaboration Office</i> tersaji sesuai dengan kebutuhan	4,00	Baik
Rata-rata		4,11	Sangat Baik

Objek pada survei merupakan pengguna layanan aplikasi Portal *Collaboration* KKP dengan jumlah responden sebanyak 663 orang. Berdasarkan hasil survei rata-rata yang diperoleh layanan aplikasi Portal *Collaboration Office* dari 4 (lima) variabel yang dinilai adalah 4,11 dengan kategori Sangat Baik. Hasil survei ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sebagai bahan pertimbangan perbaikan layanan aplikasi Portal *Collaboration Office*.

IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan. Merujuk pada Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2024,



target IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi adalah 3,5, sehingga dapat dikatakan bahwa target telah tercapai dan terlampaui sebesar 117,43%.

Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Mengintegrasikan proses bisnis seluruh layanan yang ada di KKP agar dapat berjalan lebih efisien dan optimal, dengan pengembangan menu pada *Collaboration Office* yaitu menu kearsipan dan nilai IP ASN dari pegawai KKP;
2. Untuk mendukung digitalisasi terkait penyaluran dana bergulir pengelola modal usaha, telah dilaksanakan *kick off meeting* pembangunan *platform visualization and recognition*, yang hingga saat ini pembangunannya telah selesai dilaksanakan;
3. Pengembangan aplikasi PPID KKP;
4. Pengembangan aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Pengembangan menu tanda tangan elektronik pada portal KKP;
6. Pengembangan aplikasi e-pegawai KKP;
7. Untuk mendukung digitalisasi penyaluran dana bergulir pengelola modal usaha, telah dilaksanakan uji coba aplikasi *visualization and recognition* secara *road show* di 4 kota pada bulan Oktober 2024, yaitu Cirebon, Brebes, Semarang, dan Yogyakarta;
8. Menindaklanjuti Sosialisasi *Clearance* yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pan dan RB, Pusdatin telah melaksanakan kegiatan Identifikasi Anggaran Belanja TIK dan Pengelolaan Data KKP untuk tahun anggaran 2025. Selanjutnya Pusdatin akan melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB terkait hasil identifikasi tersebut.

Tindak lanjut pelaksanaan pada tahun selanjutnya adalah :

1. Melakukan pengembangan *Portal Colaboration Office* secara berkelanjutan sebagai sistem informasi yang terintegrasi di lingkungan KKP;
2. Menerapkan tanda tangan elektronik pada seluruh proses bisnis yang ada di KKP;
3. Sosialisasi implemetansi portal di beberapa UPT KKP;

4. Sosialisasi aplikasi *platform visualization and recognition* terkait penyaluran dana bergulir pengelola modal usaha;
5. Sosialisasi menu TTDE pada menu perizinan, peraturan perundang-undangan dan kepegawaian;
6. Menyiapkan kuesioner sebagai instrument survei yang akan disampaikan kepada seluruh Unit Kerja Eselon I;
7. Melakukan survei layanan aplikasi di lingkungan KKP.



Gambar 14. Sosialisasi aplikasi *platform visualization and recognition*



Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi melalui kegiatan Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Sistem Informasi dengan anggaran senilai Rp 357.100.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 354.952.846,- atau 99,40%.

3.3.4 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim

Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (PKM) merupakan penilaian atas kinerja dan implementasi layanan sistem informasi yang diberikan oleh Pusdatin kepada pimpinan KKP dan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP dalam menyajikan data secara *real time* dalam bentuk *dashboard* pemantauan di dalam ruang *command center*.

Dalam rangka mengevaluasi hasil kinerja Pusdatin sebagai penyedia layanan sistem informasi pada *command center* KKP, maka dibutuhkan survei kepada pengguna atau *user* di Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP maupun K/L yang telah memanfaatkan layanan sistem informasi. Selain itu juga dilakukan penilaian atas capaian rencana aksi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Pusat Kontrol Maritim selama 1 tahun.

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim												
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
-	-	-	-	96,17	76	98,95	130,20	1,97	76	130,20	77	124,90	

IKU Persentase Layanan Sistem Informasi PKM merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan. Berdasarkan Memorandum dari Ketua tim kerja Pengelolaan Kendali Maritim Nomor 160/SJ.7/TU.140/I/2025 dengan perihal Capaian Indikator Kinerja Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim pada Tahun 2024 mendapat nilai persentase sebesar **98,95%**, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Capaian Persentase Layanan Sistem Informasi Tahun 2024

No.	Komponen IKU	Target	Realisasi	Capaian	Bobot X Capaian
1.	Operasional <i>Decision Support System</i>	100%	92%	92%	9,2%
2.	Operasional Infrastruktur	100%	99,03%	99,03%	9,90%

3.	<i>Data Warehouse</i>	100%	100%	100%	10%
4.	Hasil Survey Layanan Pusat Kendali Maritim	4,8	4,79	99,79%	69,85%
Total Capaian IKU					98,95%

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. *Platform* Integrasi Digitalisasi Perizinan, telah dilaksanakan *User Acceptance Test* (UAT) dan Bimbingan Teknis untuk modul SIUP, SIPI, SIKPI, P2KP, SKKP, BKP, SKAT, SPB, SLO, dan KKPRL, serta sudah diunggah ke portalperizinan.kkp.go.id
2. Telah dilakukan Pengembangan fitur analisis pengawasan di IMIP PKM untuk mendukung operasionalisasi pengawasan PSDKP.
3. Telah dilakukan monitoring operasional PKM.

Tindak lanjut pelaksanaan pada tahun 2025 adalah pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Data untuk operasional *Command Center*, akan dilaksanakan beberapa rapat koordinasi bersama *stakeholder* termasuk Eselon I pengampu aplikasi yang terlibat dalam data sebagaimana lingkup bisnis proses masing-masing Eselon I dan data transaksional perizinan.





Gambar 15. Rapat Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim melalui kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kontrol Maritim dan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan anggaran senilai Rp 2.981.040.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 2.924.513.988,- atau 98,10%.

3.3.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diamanatkan kepada seluruh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi SPBE secara berkala. Evaluasi tersebut merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan menghasilkan nilai indeks SPBE

yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

IKU Indeks SPBE KKP adalah Indikator Kinerja yang dihitung Periode tahunan dan merupakan hasil penilaian eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, hasil evaluasi Indeks SPBE KKP Tahun 2024 adalah **3,99** (kriteria “Sangat Baik”). Berikut adalah capaian KKP jika dibandingkan dengan K/L lain pada gambar berikut:

Tabel 18. Capaian Indeks SPBE KKP

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11	Kementerian Dalam Negeri	4,21	Memuaskan
12	Kementerian Luar Negeri	3,93	Sangat Baik
13	Kementerian Pertahanan	3,88	Sangat Baik
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,36	Memuaskan
15	Kementerian Keuangan	4,74	Memuaskan
16	Kementerian Pertanian	4,00	Sangat Baik
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,60	Sangat Baik
18	Kementerian Perhubungan	4,60	Memuaskan
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4,02	Sangat Baik
20	Kementerian Kesehatan	3,73	Sangat Baik
21	Kementerian Agama	4,63	Memuaskan
22	Kementerian Ketenagakerjaan	3,42	Baik
23	Kementerian Sosial	3,58	Sangat Baik
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,99	Sangat Baik
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,99	Sangat Baik
26	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4,75	Memuaskan
27	Kementerian Perdagangan	4,22	Memuaskan
28	Kementerian Perindustrian	3,44	Baik
29	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	4,35	Memuaskan
30	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,68	Memuaskan
31	Kementerian Sekretariat Negara	3,95	Sangat Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4,15	Sangat Baik
33	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	3,54	Sangat Baik

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Indeks SPBE KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
3,57	4,21	2,75	3,3	3,58	3,05	3,99	130,82		3,05	130,82	3,2	124,68

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melakukan penilaian SPBE pada 4 domain oleh KepmenPAN RB, yaitu: Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan;
2. Melakukan rapat pembahasan domain tata Kelola SPBE;
3. Forum Kolaborasi SPBE KKP;
4. *Benchmarking* dengan Provinsi Jawa Barat;
5. Melakukan Penilaian Mandiri SPBE;
6. Menyiapkan draft kepmen Manajemen SPBE, Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi, SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi);
7. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi dan Sistem Informasi, serta telah disusun Pedoman Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di lingkungan KKP. Pedoman ini diharapkan nantinya dapat memudahkan dalam pemanfaatan SPLP sebagai perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar wali data lingkup KKP;
8. Sosialisasi *Clearance* yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pan dan RB, Pusdatin telah melaksanakan kegiatan Identifikasi Anggaran Belanja TIK dan Pengelolaan Data KKP untuk tahun anggaran 2025. Selanjutnya Pusdatin akan melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB terkait hasil identifikasi tersebut;

9. Hasil Penilaian Mandiri pada evaluasi SPBE tahun 2024 telah dilaksanakan penilaian oleh Asesor Eksternal melalui kegiatan Penilaian *Interview*. Penilaian *Interview* ini merupakan salah satu tahapan penilaian eksternal dari kegiatan evaluasi SPBE yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Diharapkan hasil evaluasi SPBE mendapatkan nilai yang sangat baik, mengingat Evaluasi SPBE KKP nantinya akan menjadi nilai tertinggi pada komponen penilaian RB KKP.



Gambar 16. Forum Kolaborasi SPBE 2024

Tindak lanjut pelaksanaan pada triwulan selanjutnya adalah :

1. Berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Inspektorat Jenderal untuk menyiapkan:
 - a. Draft Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan KKP;
 - b. Draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Master Plan Teknologi Informasi.

2. Melakukan koordinasi pelaksanaan *clearance* anggaran teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP dengan instansi terkait;
3. Pembahasan kebijakan Manajemen SPBE, Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi, SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi);
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB terkait pengisian SIA SPBE;
5. Menjaga komitmen dari seluruh anggota Tim Koordinasi, sehingga dapat meningkatkan tingkat kematangan implemetasi SPBE 2024.

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP melalui kegiatan Penyelenggaraan SPBE KKP anggaran senilai Rp 31.410.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 130.210.777 atau 99,08%.

3.3.6 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP

Berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB Nomor B/51/S.OO.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024, bahwa sebenarnya pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ditiadakan, dan kegiatan tersebut berganti menjadi Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI). Untuk penyelenggaraan KIPP lingkup KKP akan tetap dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan KIPP Tahun 2023 namun akan dibuat perbedaan pada syarat penyelenggaraan inovasi minimal 1 tahun dan tidak harus layanan publik ke masyarakat.

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025

-	-	-	-	82,93	76	80,78	106,29	-1,55	76	106,29	77	104,9
---	---	---	---	-------	----	-------	--------	-------	----	--------	----	-------

IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan. Berdasarkan Nota Dinas Pusdatin Nomor 3113/SJ.7/TU.210/VIII/2024 adalah senilai **80,78** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024

No.	Eselon I	Jumlah Proposal yang disubmit	Target	Realisasi IKU	Persentase Capaian (%)
1.	DJPKRL	4 Proposal	76	84.26	110.87
2.	DJPT	6 Proposal	76	87.31	114.88
3.	DJPB	14 Proposal	76	76.07	100.10
4.	DJPDSPKP	5 Proposal	76	85.26	112.18
5.	DJPSDKP	8 Proposal	76	81.13	106.75
6.	BPPSDMKP	12 Proposal	76	80.24	105.57
7.	BPPMHKP	12 Proposal	76	80.31	105.68
Total		61 Proposal	76	80.78	106.30

Pada tanggal 9 Agustus 2024 telah dilaksanakan Rapat Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dengan terdapat 61 (enam puluh satu) proposal inovasi yang diajukan oleh Eselon I lingkungan KKP dan pengusulan pemberian penghargaan bagi inovasi yang mendapatkan predikat Top 15 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 22. Top 15 Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024

No.	Eselon I	Nama UPP	Nama Inovasi
1.	DJPT	Balai Besar Penangkapan Ikan	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)



2.	DJPKRL	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)
3.	DJPDSPKP	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	INVAPRO KAPE (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan)
4.	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangka	TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Da
5.	BPPMHKP	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkal Pinang	JAGA SI CEKATAN (Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan) Inovasi Non Digital Cepat Vira
6.	DJPT	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	SELASIH (Sistem Informasi Pelayanan Air Bers
7.	DJPB	Balai Layanan Usaha Prod uksi Perikanan Budidaya Karawang	SiPATIN (Sistem Pelayanan Terintegrasi)
8.	BPPMHKP	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram	Si Chupang New (Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang New
9.	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpan dan	SILAUT (Sistem Integrasi Layanan Usaha Terpadu
10.	DPSDKP	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik)
11.	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Taman Karang Piracora
12.	DJPDSPKP	Dit. Pemasaran	KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas)
13.	BPPSDM	Politeknik KP Sidoarjo	Aplikasi PENTARU: Penerimaan Taruna Baru (Efektif, Efisien, Transpran)
14.	DJPB	BPBAP Takalar	Bibit Rumput Laut Kualitas Unggul (Biru LautKu)
15.	BPPSDM	BDA Sukamandi	Learning Management System Electronic Millenial Learning (E-MILEA)

Secara Capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP Tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak **-1,55%** dari Tahun 2023, namun terjadi peningkatan jumlah proposal dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya ada 28 proposal. Peningkatan jumlah proposal yang dinilai pada tahun 2024

ini dikarenakan terdapat target untuk menghasilkan ide yang lebih banyak dari berbagai unit layanan publik, dengan lebih banyaknya proposal diharapkan dapat meningkatkan ditemukan ide yang lebih bervariasi untuk dijadikan inovasi unggulan KKP di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2025. Meskipun hal ini mengakibatkan penurunan nilai, namun diharapkan para calon inovator dapat belajar sebelum mengikuti kompetisi yang lebih luas.

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan IV Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

Pusat Data Statistik dan Informasi selaku penanggungjawab pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini telah selesai mengawal beberapa penilaian pelayanan publik baik internal maupun eksternal diantaranya:

1. Keputusan Menteri PANRB Nomor 489 tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2024, sebagai lokus BPSPL Pontianak, memperoleh penilaian indeks pelayanan publik 4,80 kategori (A+) pelayanan prima;
2. Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), yaitu Top 5 Inovasi Kelompok Keberlanjutan Inovasi pada Direktorat Jasa Kelautan (PUGar (Pengembangan Usaha Garam Rakyat));
3. Pusat Data Statistik dan Informasi memperoleh penghargaan sebagai Penyelenggara Inovasi Terbaik dari Kelompok Instansi Pembina Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI);
4. Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan dengan 5 lokus yaitu: Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang, DJPKRL, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, DJPT, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, DJPT, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, DJPSDKP dan Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, DJPB yang telah dilakukan evaluasi secara langsung Kementerian PANRB pada tanggal 18 September 2024;
5. Pada Peringatan Puncak Pelaksanaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 10 Desember 2024, Pusat Data, Statistik, dan Informasi berhasil mendapatkan penghargaan Terbaik Ke II



atas penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Pusat Data Statistik dan Informasi bersama Sekretariat Direktorat/Badan telah menyelesaikan laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Instansional Tahun 2024 kepada Kementerian PANRB, yaitu sebanyak 102 Unit kerja pusat dan UPT dengan Indeks Pelayanan Publik 4,39 kategori (A-) Sangat Baik;
7. Rekapitulasi pelayanan perizinan secara tatap muka di PTSA Tahun 2024 sebanyak 1.779 pengguna jasa, terdiri dari layanan konsultasi perizinan sebanyak 1.323 pengguna jasa, layanan permohonan perizinan sebanyak 251 pengguna jasa, dan layanan pengambilan dokumen perizinan sebanyak 205 pengguna jasa.



Gambar 17. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Inovasi Pelayanan Publik

Tindak lanjut pelaksanaan pada tahun selanjutnya adalah:

1. Menyiapkan tim penilai beserta *timeline* kegiatan penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada tahun 2025
2. Berkoordinasi dengan unit Eselon I lain mengenai kegiatan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh MenPANRB.

Untuk mendukung kegiatan IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP melalui 2 (dua) kegiatan, pertama adalah Sosialisasi Pedoman Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dengan anggaran senilai Rp 123,760,000,- dengan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 121.637.774,- atau 98,28% dan kedua Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP dengan anggaran senilai Rp 249.360.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 246.023.320,- atau 98,66%.

3.3.7 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) mengelola stasiun bumi penerima data satelit radar, BARATA, yang merupakan bagian penting dari infrastruktur penginderaan jauh yang digunakan untuk memantau pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. BARATA dilengkapi dengan teknologi dan sistem canggih yang mampu menerima data citra radar COSMO-SkyMed (CSK) dan *Cosmo-Skymed Second Generation* (CSG). Pada tahun anggaran 2024, BARATA mengelola 50 *scene* data citra radar, terdiri dari kombinasi antara citra COSMO-SkyMed dan *Cosmo-Skymed Second Generation*.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara jumlah data yang dikelola menjadi data geospasial kelautan dan perikanan dengan jumlah data citra satelit radar yang diakuisisi di BPISDKP. Target pada tahun 2024 adalah 90% dengan periode pengukuran tahunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat 22 kenaikan target dari 80% menjadi 90%, namun demikian terdapat penurunan jumlah *scene* yang dikelola, yaitu 50 *scene*.

Hingga akhir periode pengukuran BARATA telah berhasil melakukan akuisisi 50 *scene* data radar yang terdiri dari 8 *scene* data COSMO-Skymed (CSK) atau sebanyak 20% dari total *scene*, dan 42 *scene* data COSMO-SkyMed Second Generation (CSG) atau sebanyak 80% dari total *scene*. Data radar yang telah diakuisisi selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menghasilkan basis data geospasial kelautan dan



perikanan. Data citra CSK CSG yang telah diterima oleh BARATA sepenuhnya telah dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan meliputi:

- Pemutakhiran peta tambak sebanyak 45 scene citra (90%)
Pemetaan tambak dilakukan atas permintaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) guna mendukung kegiatan pemutakhiran peta tambak. Kegiatan pemetaan tambak ditujukan untuk mendukung program revitalisasi tambak di sepanjang wilayah pesisir utara (pantura) Pulau Jawa.
- Pengawasan *IUU Fishing* sebanyak 3 scene citra (6%)
Pemetaan *IUU Fishing* dilakukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di 2 lokasi pengawasan, Laut Sulawesi dan Laut Natuna.
- Pemetaan lokasi pelabuhan sebanyak 2 scene citra (4%).

Pemetaan lokasi pelabuhan dilakukan atas permintaan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) di 2 lokasi, PN Tual dan PPN Merauke. Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung kesiapan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di kedua lokasi tersebut.

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	100	90	100	111,11	-22,22	90	111,11	90	111,11

IKU ini merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan. Berdasarkan Laporan Pemanfaatan Data Radar Bali *Radar Ground Receiving Station* (BARATA) capaian Tahun 2024 adalah 100%.

Hingga akhir periode pengukuran BARATA telah berhasil melakukan akuisisi 50 scene data radar yang terdiri dari 8 scene data COSMO-SkyMed (CSK) atau sebanyak 20% dari total scene, dan 42 scene data COSMO-SkyMed Second Generation (CSG) atau sebanyak 80% dari total scene. Data radar yang telah diakuisisi selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menghasilkan basis data geospasial kelautan dan perikanan. Data citra CSK CSG yang telah diterima oleh BARATA sepenuhnya telah dikelola menjadi Data Geospasial Kelautan dan Perikanan meliputi:

- Pemutakhiran peta tambak sebanyak 45 scene citra (90%)
Pemetaan tambak dilakukan atas permintaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) guna mendukung kegiatan pemutakhiran peta tambak. Kegiatan pemetaan tambak ditujukan untuk mendukung program revitalisasi tambak di sepanjang wilayah pesisir utara (pantura) Pulau Jawa.
- Pengawasan IUU *Fishing* sebanyak 3 scene citra (6%)
Pemetaan IUU *Fishing* dilakukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di 2 lokasi pengawasan, Laut Sulawesi dan Laut Natuna.
- Pemetaan lokasi pelabuhan sebanyak 2 scene citra (4%) 

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi melalui kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kontrol Maritim dan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan anggaran senilai Rp 2.981.040.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 2.924.513.988,- atau 95,14%.

3.3.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP

Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan alat bantu untuk mengukur kematangan keamanan siber organisasi. Diharapkan organisasi dapat melakukan peningkatan pengelolaan keamanan siber serta memastikan pengelolaan tersebut berjalan optimal dan berfungsi secara menyeluruh.

Evaluasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber akan menghasilkan nilai indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) di instansi KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap kuesioner yang digunakan.



Kuesioner merupakan instrumen pengukuran maturitas penanganan siber dan sandi untuk memetakan tingkat kesiapan organisasi terhadap kemampuan penanganan dan menanggapi insiden keamanan siber.



Gambar 18. Aspek Pengukuran dan Tingkat Kematangan Keamanan Siber

Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dilakukan terhadap 5 aspek :

1. Tata Kelola;
2. Identifikasi;
3. Proteksi;
4. Deteksi; dan
5. Respon.

Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Apabila BSSN tidak melakukan penilaian, maka hasil capaian menggunakan hasil dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal KKP.

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW III	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	3,08	2,5	3,40	136	110,38	2,5	136	2,6	130,76

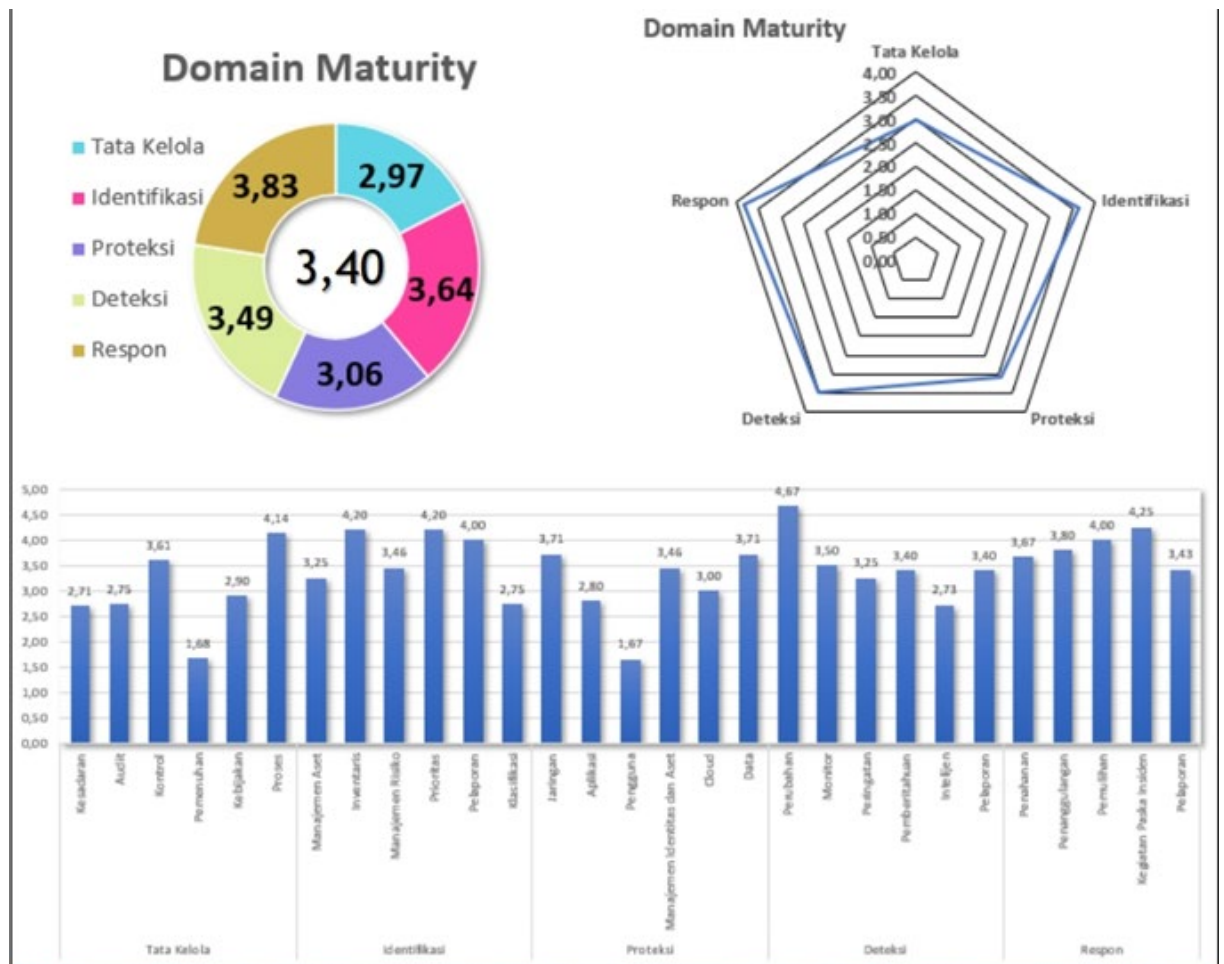
IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan. BSSN telah melakukan Penilaian dan Verifikasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber (*Cyber Security Maturity*) Tahun 2024 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 27 – 31 Mei 2024, berdasarkan Laporan Hasil Penilaian *Cyber Security Maturity* (CSM) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), KKP mendapatkan capaian sebesar **3,40**.



Gambar 19. Penilaian dan Verifikasi Cyber Security Maturity (CSM) 2024

Dari hasil verifikasi oleh Tim Verifikator BSSN, Tingkat Kematangan Keamanan Siber Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 mendapatkan indeks sebesar 3,40. Sehingga dengan Indeks Kematangan tersebut dapat ditentukan bahwa level kematangannya ada pada tingkat kematangan level 3.

Tata Kelola		Identifikasi		Proteksi		Deteksi		Respon	
2,97		3,64		3,06		3,49		3,83	
Kesadaran	2,71	Manajemen Aset	3,25	Jaringan	3,71	Perubahan	4,67	Penahanan	3,67
Audit	2,75	Inventaris	4,20	Aplikasi	2,80	Monitor	3,50	Penanggulangan	3,80
Kontrol	3,61	Manajemen Risiko	3,46	Pengguna	1,67	Peringatan	3,25	Pemulihan	4,00
Pemenuhan	1,68	Prioritas	4,20	Manajemen Identitas dan Aset	3,46	Pemberitahuan	3,40	Kegiatan Paska Insiden	4,25
Kebijakan	2,90	Pelaporan	4,00	Cloud	3,00	Intelijen	2,73	Pelaporan	3,43
Proses	4,14	Klasifikasi	2,75	Data	3,71	Pelaporan	3,40		



Gambar 20. Hasil Penilaian dan Verifikasi Cyber Security Maturity (CSM) 2024

Dengan demikian, secara kualitatif dapat digambarkan bahwa penerapan keamanan siber yang prosesnya sudah terorganisir dengan jelas, bersifat formal, dilakukan secara berulang, dilakukan reviu berkala, dan konsisten. Namun

penerapan perubahan belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum menjadi membudaya dan terintegrasi serta menerapkan otomatisasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU ini adalah:

1. Tim Keamanan Siber dan Infrastruktur TI telah melakukan kegiatan *Vulnerability Assessment* selama Bulan Oktober - Desember 2024 pada 13(tiga belas) Sistem Elektronik di KKP sebagai berikut :
 - Aplikasi *Assesment Center*
 - Aplikasi LPMUKP
 - Aplikasi PPID
 - Portal Informasi
 - UK PBJ
 - ESLO
 - Observer DJPT
 - BP3Ambo
 - Digiluh BPPSDM
 - E-Mandat PKRL
2. Selama Bulan Oktober - Desember 2024 telah terjadi beberapa insiden siber di KKP sbb :
 - 9 (sembilan) kali serangan *malware*
 - 3 (tiga) kali serangan *defacement* slot gacor judi online
 - 1 (satu) laporan kerentanan aset KKP berdasarkan data BSSN dengan kerentanan tertinggi lebih dari 300 kerentanan adalah :
 - *Login page* aplikasi CDS kelolaan DJPT
 - E-Presensi kelolaan Pusdatin
 - Sipalka kelolaan DJPT
 - 1 (satu) laporan dari BSSN terkait Kebocoran akun kredensial beberapa aplikasi dengan urutan tertinggi aplikasi LPSE, epegawai, dan satudata. Mayoritas disebabkan karena lemahnya *password* serta tidak adanya mekanisme penggantian *password* secara berkala.
3. *Website* aplikasi yang terkena serangan malware dan defacement adalah sebagai berikut:



- Web aplikasi Integrasi djpt kelolaan DJPT
 - Web aplikasi eslo kelolaan PSDKP
 - Simlatluh dan Dashboard BPPSDM kelolaan BPPSDM
4. Pemenuhan permintaan virtual server periode Oktober – Desember 2024 adalah sbb:
- Server digitalisasi perizinan kelolaan PKM
 - Server portal data kelolaan DATIS
 - Server digiluh kelolaan BPPSDM
 - Server stelina kelolaan PDS.

Tindak lanjut pelaksanaan IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP pada tahun selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan evaluasi hasil asesmen Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP yang dilakukan oleh BSSN;
2. Melakukan koordinasi dalam rangka perbaikan Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP;
3. Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber (*Cyber Security Maturity*) pada Oktober 2024.



Gambar 21. Penghargaan KKP-CSIRT sebagai Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Sektor Pemerintah

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP melalui kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Siber dan Data Analitik dengan

anggaran senilai Rp 876.865.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 836.226.368,- atau 95,37%.

3.3.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan. Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan merupakan alat bantu untuk mengukur penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Evaluasi Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan akan menghasilkan nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia di instansi KKP berdasarkan jawaban atas pertanyaan dalam Lembar Kerja SDI.

Pengukuran Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap aspek-aspek berikut :

1. Pembiayaan;
2. Kelembagaan;
3. SDM;
4. Teknologi Informasi;
5. Penyelenggaraan;
6. Koordinasi;
7. Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
8. Regulasi.



Pada tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Satu Data Indonesia telah mengadakan *Asesmen* Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi internal Sekretariat SDI terhadap hasil asesmen dalam kurun waktu dua tahun, maka *asesmen* tersebut membutuhkan perincian dan perbaikan metodologi sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk memastikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dapat diterapkan secara optimal di Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahun 2024 Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI yang bertujuan untuk memetakan penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2023.

Evaluasi Penyelenggaraan SDI dilaksanakan pada seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mencakup pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian ini dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership dengan rincian struktur penilaian pada Gambar 1. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI).

Untuk mendukung IKU tersebut, Pusdatin diundang pada kegiatan pendampingan pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia. Yaitu penyusunan standar data dan metadata data prioritas lingkup KKP.

Penilaian Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Tabel 25. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	89,17	70	89,17	127,39	-9.80	70	127,39	70	127,39

IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan baru dilaksanakan pada tahun 2023, dan merupakan IKU yang dihitung periode tahunan, pada tahun 2024 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas belum merilis capaian hasil IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukannya penilaian pada bulan Oktober tahun 2024, maka nilai hasil capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya yaitu **89,17**.

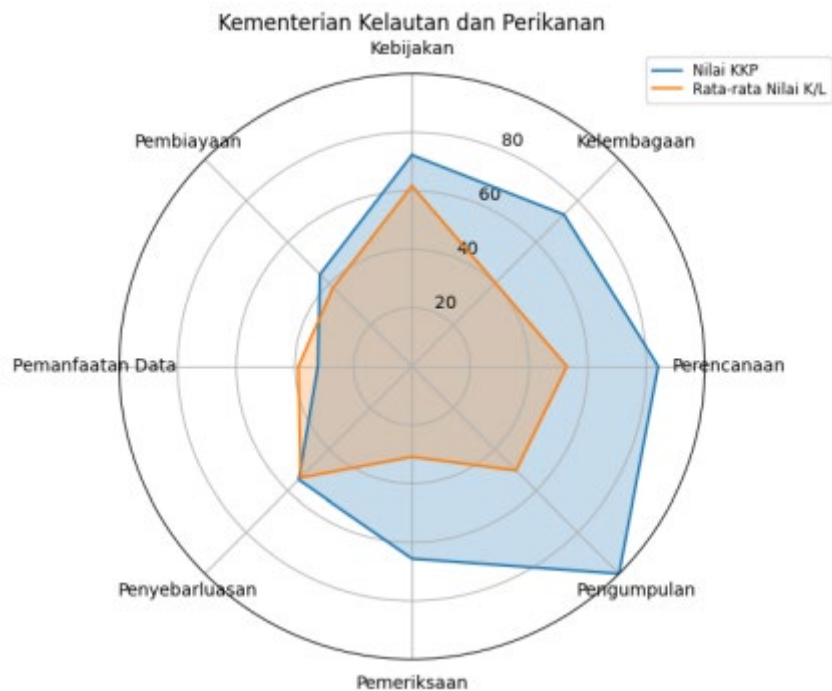
Sekretariat Satu Data Indonesia akan melakukan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah melalui penghitungan Indeks SDI. Dalam hal ini, terdapat beberapa Domain, Aspek, Indikator penilaian Evaluasi pelaksanaan SDI yang akan dipergunakan dalam menyusun Indeks SDI. KKP telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner *Analitical Hierarchy Proccess* (AHP) indeks Satu Data Indonesia. Pengisian kuesioner dilakukan melalui *link* berikut <https://link.bappenas.go.id/KuesionerAHPIndeksSDI>. Hasil penilaian untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

Tabel 26. Nilai Domain Indeks SDI

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	72.81
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	73.08
3	Domain Data Leadership	23%	36.96
Indeks Satu Data Indonesia			64.68

Tabel 27. Nilai Aspek Indeks SDI

No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	17%	72.23
2	Aspek Kelembagaan	17%	73.39
3	Aspek Perencanaan	11%	84.09
4	Aspek Pengumpulan	6%	100.00
5	Aspek Pemeriksaan	18%	65.55
6	Aspek Penyebarluasan	8%	54.69
7	Aspek Pemanfaatan Data	14%	32.14
8	Aspek Pembiayaan	9%	44.44



Gambar 22. Capaian Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Tabel 28. Rekomendasi Domain Kebijakan dan Kelembagaan Indeks SDI

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Kebijakan				
1	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi Satu Data Indonesia	10%	84.62	- Peraturan yang telah diterbitkan perlu direview kembali dengan mengacu pada Juklak Sesmen PPN/ Bappenas No. 9/2022 mengenai Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat. Peraturan belum memuat bagian ketentuan peralihan, manajemen hak akses.
2	Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat K/L/D	7%	54.55	- SK yang telah ditetapkan perlu direview kembali dengan mengacu pada Juklak Sesmen PPN/ Bappenas No. 9/2022 mengenai Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat. SK belum memuat penetapan Walidata, Penyelenggaraan SDI, Ketentuan Pembantuan, Pendanaan, Tugas Walidata.
Aspek Kelembagaan				
3	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	3%	71.43	- Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Manajemen Hak Akses sesuai dengan Juklak Sesmen PPN/ Bappenas No.5/2022 tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data - Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Redundansi Data.
4	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat	5%	60.00	- Perlu menyusun SOP Pemeriksaan Data sesuai dengan proses bisnis Pemeriksaan Data pada Peraturan Presiden No.39/2019. - Perlu menyusun SOP Penyebarluasan Data sesuai dengan proses bisnis Pengumpulan Data pada Peraturan Presiden No.39/2019. - Perlu menyusun SOP Pengumpulan Data sesuai dengan proses bisnis Pengumpulan Data pada Peraturan Presiden No.39/2019.



No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
5	Persentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	4%	100.00	- Perlu menyusun SOP Manajemen Akses sesuai dengan Juklak Sesmen PPN/ Bappenas No.5/2022 tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data
6	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia	5%	66.67	- Dapat melakukan pemetaan kebutuhan SDM spasial penyelenggara SDI. - Dapat melakukan pemetaan kebutuhan SDM statistik penyelenggara SDI.

Tabel 29. Rekomendasi Domain Penyelenggaraan SDI

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Perencanaan				
7	Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D	7%	75.00	- Daftar Data yang telah disusun dapat ditetapkan dalam SK Menteri/Kepala Badan.
8	Persentase pemenuhan kriteria partisipasi aktif dalam penetapan Data Prioritas	4%	100.00	
Aspek Pengumpulan				
9	Persentase Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat ke Sekretariat SDI tingkat Pusat sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan	6%	100.00	
Aspek Pemeriksaan				
10	Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memenuhi standar data statistik	3%	21.05	- Dapat menyusun Standar Data Statistik, membuat pengajuan ke INDAH (indah.bps.go.id) dan berkoordinasi dengan Pembina Data Statistik dalam penyusunan Standar Data untuk Data Prioritas dengan jenis data Statistik.
11	Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memenuhi standar data geospasial	3%	46.15	- Dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Standar Data untuk Data Prioritas dengan jenis data Spasial.
12	Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan	3%	78.95	- Dapat menyusun Metadata Statistik, membuat pengajuan ke INDAH (indah.bps.go.id) dan berkoordinasi

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
	struktur dan format baku			dengan Pembina Data Statistik dalam penyusunan Metadata untuk Data Prioritas dengan jenis data Statistik.
13	Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku	3%	84.62	- Dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Metadata untuk Data Prioritas dengan jenis data Spasial.
14	Persentase Data Prioritas yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas)	2%	93.75	- Perlu menyimpan data dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik yang memenuhi kaidah interoperabilitas.
15	Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI	2%	50.00	- Dapat mengusulkan dan menerapkan kode referensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi untuk ditetapkan dalam Forum SDI. - Dapat menggunakan dan menerapkan data induk yang telah ditetapkan melalui Forum SDI.
16	Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Data Prioritas oleh Walidata dan Pembina Data	2%	100.00	
Aspek Penyebarluasan				
17	Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Portal SDI	2%	100.00	
18	Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI	2%	75.00	- Dapat mengajukan Surat Permohonan Integrasi ke Sekretariat SDI tingkat Pusat.
19	Persentase Data Prioritas yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI	2%	43.75	- Dapat menyebarluaskan seluruh Data Prioritas yang telah ditetapkan pada Portal SDI dengan cara mengintegrasikan portal K/L dengan Portal SDI.
20	Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D	2%	0.00	- Dapat menerapkan Manajemen Hak Akses pada Portal Data K/L sesuai dengan Juklak Sesmen PPN/ Bappenas No. 5/2022 tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data.



Tabel 30. Rekomendasi Domain Domain Data Leadership SDI

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Pemanfaatan Data				
21	Persentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	6%	75.00	- Dapat memanfaatkan data melalui Dashboard Portal K/LD.
22	Persentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas K/L/D melalui peran Koordinator Forum SDI tingkat K/L/D	4%	0.00	- Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Redundansi Data. - Walidata dapat mengidentifikasi duplikasi data dalam Daftar Data.
23	Persentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP	4%	0.00	- Dapat melakukan pengajuan akun SPLP.
Aspek Pembiayaan				
24	Persentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai	4%	100.00	- Dapat memasukkan Penyelenggaraan SDI dalam dokumen evaluasi pembangunan K/L. - Dapat menganggarkan kegiatan Penyelenggaraan SDI dalam dokumen Rencana Kerja K/L. - Dapat memasukkan Penyelenggaraan SDI dalam dokumen perencanaan pembangunan K/L.
25	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Satu Data Indonesia menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D	5%	0.00	

Berdasarkan hasil diatas, Bappenas menyampaikan bahwa terdapat perubahan metodologi evaluasi dari *asesmen* yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, sehingga hasil asesmen tersebut tidak dapat menjadi pembanding dengan evaluasi 2023.

Kegiatan pendukung tingkat maturitas satu data kelautan dan perikanan tahun 2024, antara lain:

1. Validasi Nasional Semester I, dengan hasil data produksi perikanan dan kelautan;
2. melakukan koordinasi dengan unit Eselon I terkait dan *helpdesk* pengisian/*update*;
3. menyelenggarakan Forum Satu Data.

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Statistik dengan anggaran senilai Rp 541.272.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 540.510.117,- atau 99,86%.



3.3.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP

Dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dijelaskan bahwa arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE diterapkan dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yakni pada lingkup Nasional, lingkup Instansi Pusat, dan lingkup Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui, SPBE bukan hanya merupakan IKU KKP dan Pusdatin, tapi juga menjadi bagian penting dalam program Reformasi Birokrasi (RB). Pada tahun 2024, Nilai Tingkat Kebijakan Arsitektur SPBE yang digunakan untuk RB adalah nilai Indeks Indikator 1, yaitu “Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah”. Indikator 1 ini kemudian mendapatkan nilai 2 karena KKP sudah memiliki kebijakan Arsitektur SPBE, yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2024.

Tabel 31. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	2	3	3	100	-1,8	3	100	3	100

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP adalah periode tahunan. Berdasarkan aplikasi SIA-SPBE, Nilai Implementasi Arsitektur SPBE Pusdatin mendapatkan capaian senilai 3. Berikut

adalah *Screenshot* capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Aristektur SPBE KKP jika dibandingkan dengan K/L lain:

HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024			
Hasil Evaluasi SPBE Kementerian			
No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3,08	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4,00	Sangat Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,46	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3,92	Sangat Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3,98	Sangat Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4,64	Memuaskan
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,63	Sangat Baik
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4,33	Memuaskan
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,75	Sangat Baik
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4,46	Memuaskan

Gambar 23. Hasil Evaluasi SPBE Tingkat Kementerian Tahun 2024

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11	Kementerian Dalam Negeri	4,21	Memuaskan
12	Kementerian Luar Negeri	3,93	Sangat Baik
13	Kementerian Pertahanan	3,88	Sangat Baik
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,36	Memuaskan
15	Kementerian Keuangan	4,74	Memuaskan
16	Kementerian Pertanian	4,00	Sangat Baik
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,60	Sangat Baik
18	Kementerian Perhubungan	4,60	Memuaskan
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4,02	Sangat Baik
20	Kementerian Kesehatan	3,73	Sangat Baik
21	Kementerian Agama	4,63	Memuaskan
22	Kementerian Ketenagakerjaan	3,42	Baik
23	Kementerian Sosial	3,58	Sangat Baik
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,99	Sangat Baik
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,99	Sangat Baik
26	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4,75	Memuaskan
27	Kementerian Perdagangan	4,22	Memuaskan
28	Kementerian Perindustrian	3,44	Baik
29	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	4,35	Memuaskan
30	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,68	Memuaskan
31	Kementerian Sekretariat Negara	3,95	Sangat Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4,15	Sangat Baik
33	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	3,54	Sangat Baik

-3-

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
34	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	4,10	Sangat Baik



Gambar 24. Screenshot capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP pada aplikasi SIA-SPBE

Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan rapat koordinasi proses bisnis Level 1 dengan unit kerja terkait;
2. Melakukan BIMTEK pengisian SIA SPBE V2 dengan Unit Eselon I lingkup KKP dengan pendampingan oleh Kementerian PAN dan RB;
3. Melakukan pengisian Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA SPBE) V2 dengan Unit Eselon I lingkup KKP dengan pendampingan oleh Kementerian PAN dan RB;
4. Melakukan *evaluasi* pengisian SIA SPBE V2 dengan Kementerian PAN dan RB;
5. Telah dilaksanakan penilaian oleh Asesor Eksternal melalui kegiatan Penilaian *Interview*. Penilaian *Interview* ini merupakan salah satu tahapan penilaian eksternal dari kegiatan evaluasi SPBE yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Evaluasi SPBE KKP nantinya akan menjadi nilai tertinggi pada komponen penilaian RB KKP.

Tindak lanjut kegiatan pada tahun 2025 adalah:

1. Melengkapi proses bisnis As-is dan To-be pada seluruh unit kerja lingkungan KKP;
2. Melakukan *review* pengisian SIA SPBE V2 dengan Kementerian PAN dan RB;
3. Mempersiapkan dokumen penilaian SIA-SPBE tahun 2025.

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Reviu dan Kebijakan dengan anggaran senilai Rp 541.272.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 540.510.117,- atau 99,09%.

3.3.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP

Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Data dan informasi statistik tersebut dikelola sesuai prinsip satu data indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Menurut pemanfaatannya, statistik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, Statistik Sektor, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan Statistik Sektor.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektor dengan cara mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan Statistik Sektor pada Instansi Pusat dan

Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

EPSS sendiri merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

1. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Tabel 32. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	2,68	2,75	2,73	99,27	0,05	2,75	99,27	2,75	99,27

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP adalah periode tahunan. Berdasarkan surat Kepala BPS Nomor B-366/01000/ES/2024, tanggal 17 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), capaian yang diperoleh oleh KKP adalah **2,73** dengan predikat 'Baik'. Berikut disampaikan capaian-capaian EPSS dari BPS :

Tabel 33. Capaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP Tahun 2024

A. PREDIKAT EPSS DAN NILAI IPS PADA INSTANSI PUSAT**1. Kementerian**

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kementerian Agama	2.72	Baik
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2.47	Cukup
3	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.69	Baik
4	Kementerian Dalam Negeri	3.28	Baik
5	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.98	Baik
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.08	Cukup
7	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.39	Baik
8	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	2.28	Cukup
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2.73	Baik
10	Kementerian Kesehatan	3.07	Baik
11	Kementerian Ketenagakerjaan	3.18	Baik
12	Kementerian Keuangan	2.39	Cukup
13	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.37	Baik
14	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2.57	Cukup
15	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2.99	Baik
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.45	Cukup
17	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2.39	Cukup
18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.62	Baik
19	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.68	Baik
20	Kementerian Luar Negeri	2.68	Baik
21	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.42	Baik
22	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.49	Baik
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.76	Baik
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2.69	Baik
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2.31	Cukup

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
26	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2.41	Cukup
27	Kementerian Perdagangan	3.02	Baik
28	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2.23	Cukup
29	Kementerian Perhubungan	2.98	Baik
30	Kementerian Perindustrian	3.05	Baik
31	Kementerian Pertahanan	2.14	Cukup
32	Kementerian Pertanian	3.67	Sangat Baik
33	Kementerian Sekretariat Negara	2.76	Baik
34	Kementerian Sosial	2.63	Baik

Dalam penilaian IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP dimana kegiatan statistik sektoral yang dinilai Tahun 2024 adalah :

1. Pendataan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
2. Pendataan Produksi Budi daya dan perikanan tangkap.

Beberapa perbaikan telah dilakukan untuk penilaian Tahun 2024, yaitu:

1. Domain Kualitas Data untuk Indikator Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna berupa:
 - a. SOP Permintaan Data
 - b. Penyusunan kuesioner kepuasan terhadap data sebagaimana pada *link* berikut: <https://forms.office.com/r/1Gd16YVD3k>.
2. Domain Statistik Nasional Aspek Pemanfaatan Data Statistik berupa:
 - a. Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan Kriteria berupa: Penggunaan data NTN, NTPi, PDB Perikanan, dan data ekspor yang merupakan statistik dasar perhitungan dari BPS, sebagai tolok ukur capaian kinerja dalam rencana strategis (Renstra) KKP 2020 - 2024 yang tertuang dalam PermenKP no 17 tahun 2020.
 - b. Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan Kriteria berupa: Penggunaan data statistik sektoral dalam sasaran strategis (SS) salah satunya pada SS-7 "industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing" dengan indikator kinerja: produksi perikanan, produksi garam nasional, dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP skala kecil, dan kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan pada Renstra KKP 2020 – 2024.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah :

1. Melakukan kegiatan monitoring kualitas data pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka) dan produksi perikanan budi daya di 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyusun draf Kepmen KP tentang Jadwal Publikasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan;
3. Mengusulkan Kegiatan Produksi Perikanan Budi Daya melalui web Romantik BPS untuk mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS;
4. Melaksanakan kegiatan reviu terhadap domain dan indikator dalam EPSS secara menyeluruh melalui rapat koordinasi dengan produsen data terkait.





Gambar 25. Koordinasi Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui kegiatan Validasi Nasional, Analisis Data IKU KKP dan kegiatan prioritas dengan anggaran senilai Rp 556.549.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 556.480.027.- atau 99,98%.

3.3.12 Indeks Pelayanan Publik KKP

Pelayanan merupakan bagian integral dan strategis bagi pengembangan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan serta pemenuhan pelayanan publik. Keberhasilan birokrasi dan pelayanan yang berkualitas merupakan harapan masyarakat. Kesadaran Unit Pelayanan Publik dalam mewujudkan Pelayanan Prima agar masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, salah satunya diwujudkan dengan melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada Pasal 7 ayat (2) huruf b juga mengamanatkan kepada Penanggung jawab untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Merujuk pada ketentuan tersebut, perbaikan atas kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari seluruh instansi penyelenggara pelayanan. Dengan demikian, kebutuhan akan pelayanan yang berkualitas menjadi prioritas

untuk diwujudkan. PEKPPP merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan PEKPPP telah dilakukan setiap tahun yang menghasilkan nilai IPP. Dari kegiatan yang telah dilakukan secara periodik itu, kegiatan pemantauan atas hasil evaluasi belum menjadi bagian yang penting untuk dilakukan dan hanya berfokus pada kegiatan evaluasi. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kegiatan pemantauan agar proses PEKPPP seluruhnya dapat berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan PEKPPP dapat dilakukan secara langsung di lokasi Unit Lokus Evaluasi (ULE) maupun secara *daring*.

Tabel 34. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Indeks Pelayanan Publik KKP												
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
-	-	-	-	4,64	4,59	4,80	104,58	3,27	4,59	104,58	4,6	104,35	

Periode penghitungan capaian IKU IPP KKP adalah periode tahunan. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 489 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian dan Lembaga Tahun 2024 menyampaikan bahwa Kementarian Kelautan dan Perikanan dengan Unit Pelayanan Publik Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak telah mendapatkan nilai indeks sebesar **4,80** dengan kategori A. KKP berada pada urutan ke lima (5) dari seluruh penilaian K/L dengan capaian indeks berada di bawah Kementerian Agama dan di atas Komisi Pemilihan Umum.

Tabel 35. Capaian Indeks Pelayanan Publik KKP

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS	KATEGORI
1.	Kementerian Keuangan	KPP Pratama Palu	4,91	A
2.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar POM Surabaya	4,91	A
3.	Badan Pusat Statistik	Pelayanan Statistik Terpadu BPS RI	4,91	A
4.	Kementerian Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali	4,86	A
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	4,80	A
6.	Komisi Pemilihan Umum	Pelayanan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi DIY	4,79	A
7.	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional X BKN Denpasar	4,78	A
8.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	4,77	A
9.	Kementerian	Balai Pengelola Kereta Api	4,74	A

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah:

1. Pusat Data Statistik dan Informasi bersama Sekretariat Direktorat/Badan telah menyelesaikan laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Instansional Tahun 2024 kepada Kementerian PANRB, yaitu sebanyak 102 Unit kerja pusat dan UPT dengan Indeks Pelayanan Publik 4,39 kategori (A-) Sangat Baik;
2. Pusat Data Statistik dan Informasi selaku penanggungjawab pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini telah selesai mengawal beberapa penilaian pelayanan publik baik internal maupun eksternal diantaranya:
 - a. Keputusan Menteri PANRB Nomor 489 tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2024, sebagai lokus BPSPL Pontianak, memperoleh penilaian indeks pelayanan publik 4,80 kategori (A+) pelayanan prima;
 - b. Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), yaitu Top 5 Inovasi Kelompok Keberlanjutan Inovasi pada Direktorat Jasa Kelautan (PUGar (Pengembangan Usaha Garam Rakyat).
3. Menerima Penghargaan dari Kementerian PANRB hanya diberikan untuk **10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga terbaik** pada kegiatan Gebyar Pelayanan Prima 8 Oktober 2024 di Jakarta bertajuk "Wujudkan Ekosistem Pelayanan

Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif". 10 (sepuluh)

Kementerian/Lembaga terbaik dimaksud, adalah:

1. Kementerian Keuangan
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Badan Pusat Statistik
4. Kementerian Agama
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Komisi Pemilihan Umum
7. Badan Kepegawaian Negara
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
9. Kementerian Perhubungan
10. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI



Gambar 26. Penghargaan PEKPPP Nasional dari Kementerian PANRB

Tindak lanjut yang akan dilakukan selanjutnya adalah:

1. Melaksanakan rekomendasi yang akan diberikan oleh Kementerian PANRB atas hasil penilaian PEKPPP;
2. Melaporkan hasil evaluasi PEKPPP kepada Sekretaris Jenderal.

Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Pelayanan Publik KKP melalui kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan anggaran senilai Rp 181.872.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 179.534.850,- atau 98,71%.

3.3.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai tahun 2022 Ombudsman RI melakukan penyempurnaan lagi atas metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Maksud dari penilaian ini yaitu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengaduan. Semua penilaian tersebut, menjadi komponen dari Opini Pengawasan Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Perubahan ini diharapkan menjadi lebih komprehensif lagi dalam menakar mutu pelayanan publik: dimensi input dan proses (*service manufacturing*) hingga *output* dan dampak (*impactful public service*).

Kemudian pada tahun 2023 kembali dilakukan penyempurnaan dan pengembangan variabel serta indikator penilaian yaitu: penilaian pada Kementerian dan Lembaga ditambahkan variabel Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan penilaian pada Pemerintah Daerah ditambahkan Standar Pelayanan Minimal. Dimana hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP),



Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.

Tabel 36. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	86,66	89,37	88,86	85	90,15	106,06	1,29	85	106,06	88,87	101,44

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP adalah periode tahunan. Berdasarkan Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor R/3667/PC.02/XI/2024 tanggal 06 November 2024, hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan  Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai **90,15 (Zona Hijau)** dengan kategori **A (Kualitas Tertinggi)**. Jika dibandingkan dengan K/L lain, capaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP berada pada peringkat ke empat (4) dengan posisi di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (92,18) dan di atas Kementerian Luar Negeri (89,39).





Gambar 27. Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP Tahun 2024

Persentase realisasi atas capaian 2024 adalah sebesar 106,06% dari target, dengan rekapitulasi hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

No.	Unit Pelayanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21,85%)	Proses (32,37%)	Output (24,24%)	Pengaduan (21,54%)	
1.	Direktorat Penataan Ruang Laut	18,13	27,70	23,27	21,01	90,10
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	18,18	29,44	23,27	21,01	91,90
3.	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	18,92	27,11	23,27	21,01	90,32
4.	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	18,20	27,70	23,27	21,01	90,17
5.	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen	17,62	27,18	22,46	21,01	88,27
Nilai Akhir dan Zona		90,15				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah:

1. Menyampaikan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 kepada seluruh UPP Pusat yang menjadi Lokus

Penilaian, melalui Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi sebagai berikut:

- a) Nomor 1/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Direktorat Penataan Ruang Laut;
 - b) Nomor 2/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan;
 - c) Nomor 3/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - d) Nomor 4/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada; dan
 - e) Nomor 5/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen.
2. Menyampaikan rekomendasi Ombudsman RI yang perlu ditindaklanjuti kepada Lokus UPP berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, melalui Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 6/SJ.7/TU.140/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Pemberitahuan untuk Menindaklanjuti Produk Pengawasan Ombudsman RI dalam rangka mendukung Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan tenggat waktu sampai dengan bulan Maret 2025.

Untuk mendukung kegiatan IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP melalui kegiatan Penyusunan Standar Layanan Perizinan Terpadu dengan anggaran senilai Rp 143.590.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 140.380.610,- atau 97,76%.



3.3.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP

Dalam rangka mengetahui dan mengukur sejauh mana kualitas pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan, yaitu dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup KKP.

IKU SKM merupakan Indikator Kinerja yang dihitung berdasarkan periode triwulanan, dan baru dilaksanakan di tahun 2023. Berikut ini adalah hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan IV Tahun 2024 per Unit Eselon I melalui *tools* SKM:

Tabel 38. Hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan IV Tahun 2024

Unit Eselon I	UPP Aktif	UPP Melakukan SKM	Layanan dilaksanakan SKM	Jumlah Responden	Nilai SKM
DJPKRL	12	12	16	474	93,67
DJPT	26	26	39	7.648	90,52
DJPB	18	18	9	1.468	92,22
DJPDSPKP	5	4	8	51	90,96
DJPSDKP	15	15	5	1.303	93,40
BPPSDMKP	17	14	32	968	89,64
BPPMHKP	47	46	17	2.681	93,34
SETJEN (PTSA)	1	1	21	156	87,86
KKP	141	136	131	14.749	91,47 Sangat Baik

Rincian nilai per Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan IV Tahun 2024 yaitu:

Tabel 39. Hasil Nilai Unsur Pelayanan SKM KKP Triwulan IV Tahun 2024

Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1 - Persyaratan Layanan	3,70
U2 - Kemudahan Prosedur	3,67
U3 - Waktu Penyelesaian	3,65
U4 - Kesesuaian Biaya	3,66
U5 - Kesesuaian Produk	3,66
U6 - Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas	3,63
U7 - Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas	3,66
U8 - Layanan Konsultasi	3,65
U9 - Kualitas Isi/Sarana Prasarana	3,65

Tabel berikut adalah hasil capaian realisasi IKU SKM KKP Triwulan IV Tahun 2024:

Tabel 40. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Survei Kepuasan Masyarakat KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	91,01	88,30	91,47	103,59	0.3	88,30	103,59	89	102,78

Pada Tabel diatas terlihat bahwa realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP adalah 91,47 yang artinya capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 88,30 dengan capaian 103,59%. Analisis atas hasil SKMU KKP Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah responden sebanyak 14.749 dengan IKM 91,47 kategori mutu pelayanan “Sangat Baik (A)”. Jumlah responden meningkat sebanyak 4% dibandingkan periode sebelumnya, dimana kenaikan terbanyak pada responden Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terjadi penurunan jumlah responden signifikan sebanyak 87% yang disebabkan perpindahan layanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan ke Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
3. Presentase UPP yang melaksanakan SKM Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 96%, yaitu 136 (seratus tiga puluh enam) UPP yang terdiri dari 16 (enam belas) UPP Pusat dan 120 (seratus dua puluh) Unit Pelaksana Teknis;
4. UPP yang tidak memiliki responden, yaitu Politeknik KP Sorong, SUPM Tegal, SUPM Waiheru, dan SKIPM Gorontalo. Sementara itu, terdapat 2 (dua) UPP dengan responden tunggal yang dianggap valid, yaitu pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo;
5. SKM dilaksanakan atas 131 (seratus tiga puluh satu) layanan, dengan layanan terbanyak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebanyak 39 layanan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebanyak 32 layanan; dan
6. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan Nilai rata-rata (NRR) lebih dari 3 (tiga) dengan rata-rata keseluruhan 3,66 dan menghasilkan IKM KKP sebesar 91,47. Sementara itu, 3 (tiga) unsur pelayanan dengan nilai terendah yang perlu menjadi bahan evaluasi, yaitu U6 - Kecepatan Respon atau Kompetensi Petugas, U3 - Waktu Penyelesaian, dan U9 - Kualitas Isi/Sarana Prasarana.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melakukan validasi hasil responden yang dihimpun melalui *Tools* SKM bersama Sekretariat Eselon I, yaitu atas hasil SKM Triwulan IV Tahun 2024;





Gambar 28. Validasi SKM TW IV Tahun 2024

2. Menghimpun Nilai IKM dan laporan pelaksanaan SKM per UPP periode Triwulan I s.d III Tahun 2024 sebagai pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi dan periode pelaksanaan Triwulan III dan IV Tahun 2023 sebagai bahan pelaporan kepada Kementerian PANRB, dengan rincian capaian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pusat Data, Statistik, dan Informasi telah mengkoordinasi penyampaian hasil SKM melalui Nota Dinas Nomor 3637/SJ.7/TU.140/IX/2024 tanggal 24 September 2024 dan Nomor 4273/SJ.7/TU.140/XI/2024 tanggal 5 November 2024 hal Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 dan Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Tahun 2023;
 - b) menyelenggarakan koordinasi pemantauan *progress* pelaporan bersama Sekretariat Eselon I, melalui rapat Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 November 2024;



Gambar 29. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan

- c) menyampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 dan Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Tahun 2023 kepada Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB melalui Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.1461/SJ/TU.140/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 41. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat KKP Tahun 2024

Periode Pelaksanaan SKM	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Triwulan I	92,46	91,49	90,54	91,02	90,86	90,14	90,83	90,56	90,59
Triwulan II	92,05	91,37	90,47	90,74	90,67	89,95	90,81	90,59	90,41
Triwulan III	92,77	92,16	91,24	91,60	91,50	90,77	91,67	91,19	90,94
IKM KKP Tahun 2024	92,42	91,67	90,75	91,12	91,01	90,29	91,10	90,78	90,64
	91,09 (A atau Sangat Baik)								

Tabel 42. Nilai Indkes Kepuasan Masyarakat KKP Tahun 2023

Periode Pelaksanaan SKM	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Triwulan I	88,59	88,24	86,36	90,01	88,45	89,45	90,05	89,30	92,02
Triwulan II	91,24	90,80	89,80	90,47	90,18	88,54	89,97	90,27	89,28
Triwulan III	91,62	90,79	89,93	91,02	90,35	89,54	90,33	90,39	89,93
Triwulan IV	92,32	91,53	90,80	91,59	91,05	90,00	90,96	91,05	90,66
SKM KKP Tahun 2023	90,94	90,34	89,22	90,77	90,01	89,38	90,33	90,25	90,47
	90,18 (A atau Sangat Baik)								

U1: Persyaratan Pelayanan

U2: Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan

U3: Waktu Penyelesaian

U4: Kesesuaian Biaya/Tarif

U5: Produk Pelayanan

U6: Kompetensi Petugas/Kecepatan Respon (bagi layanan *online*)

U7: Perilaku Petugas/Kemudahan Fitur (bagi layanan *online*)

U8: Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

U9: Sarana dan Prasarana

3. Menyampaikan daftar UPP yang tidak memiliki responden SKM kepada Sekretariat Eselon I sebagai bahan evaluasi Unit Penyelenggara Layanan, yaitu atas Direktorat Air Payau, Politeknik KP Bone, SUPM Ladong, SUPM Pariaman, dan SUPM Tegal melalui Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 3920/SJ.7/TU.140/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024. Sementara itu, akan disampaikan juga UPP yang tidak memiliki responden pada Triwulan IV Tahun 2024 pada saat kegiatan validasi; dan
4. Menyusun pedoman penggunaan aplikasi Si-Susan per level pengguna, yaitu:
 - a) pedoman bagi Administrator UPP; dan
 - b) pedoman bagi Administrator Eselon I.



Gambar 30. Pedoman penggunaan aplikasi Si-Susan

5. Pusat Data, Statistik, dan Informasi telah melaksanakan validasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yaitu indeks kepuasan Masyarakat dengan nilai 91,09 kategori Mutu (A) Sangat Baik, serta telah menyampaikan laporan tindak lanjut secara tuntas atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat KKP Tahun 2023 kepada Kementerian PANRB.

Untuk mendukung kegiatan IKU Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP melalui kegiatan Monev Layanan Perizinan Terpadu dengan anggaran senilai Rp 186.540.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 169.692.042,- atau 90,97%.

3.3.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan pengetahuan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan pelaksanaan SAKIP lingkup Pusdatin adalah untuk:

1. Mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Pusdatin
2. Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan bersifat orientasi;
3. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP lingkup Pusdatin;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi lingkup Pusdatin; dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 43. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi												
Nama IKU	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin												
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
-	-	-	-	87,15	84	84,55	100,65	-2,6	84	100,65	87	97,18	

Periode penghitungan capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin adalah periode tahunan. Berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal dengan Nomor B.1259/SJ/RC.610/X/2024 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024 pada tanggal 30 Oktober 2024, Pusdatin mendapatkan capaian nilai hasil evaluasi sebesar **84,55** dengan predikat A “Memuaskan”.

Tabel 44. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,90	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	26,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,75	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	87,15	84,55
Predikat Penilaian			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Jika dibandingkan dengan Biro lain lingkup Sekretariat Jenderal, capaian Pusdatin berada di bawah capaian dari Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa dan di atas dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, rincian capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Setjen Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Target	Nilai	Capaian
1.	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	84	85,80	102,16
2.	Biro Hukum	84	88,50	105,35
3.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	84	82,20	97,85
4.	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	84	85,20	101,42
5.	BLU LPMUKP	84	81,50	97,02
6.	Pusat Data, Statistik dan Informasi	84	84,55	100,65
7.	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	84	85,50	101,78
8.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	84	84,55	100,65
9.	Biro Perencanaan	84	87,70	104,4

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung IKU antara lain adalah:

1. Menyiapkan seluruh dokumen pendukung PM SAKIP, yang terdiri dari:

- a. Perjanjian Kinerja;
 - b. Manual IKU;
 - c. Rincian Target IKU;
 - d. Rencana Aksi;
 - e. LKJ Level 2;
 - f. Data dukung LKJ.
2. Menginput perencanaan dan hasil kinerja satuan kerja di aplikasi KINERJAKU Triwulan IV tahun 2024;
 3. Menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk monitoring kinerja individu;
 4. Rapat Tim Pengelolaan Kinerja untuk memantau target, realisasi, capaian dan data dukung yang diinput pada aplikasi Kinerjaku Triwulan IV;
 5. Meng-*upload* dokumen kelengkapan SAKIP Pusdatin ke dalam *google drive*, <http://bit.ly/DokumenSAKIPSetjen> dan <http://bit.ly/DokumenSAKIP Pusdatin>.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah :

1. Menyiapkan data capaian yang dihitung secara triwulanan;
2. Menyiapkan Laporan Kinerja triwulanan tahun 2025 agar dapat disampaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan hasil *review* oleh Tim SAKIP KKP.



Gambar 31. Rapat Penyiapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Monitoring Kinerja Individu



Untuk mendukung kegiatan IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Kinerja Pusdatin dengan anggaran senilai Rp 333.290.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 329.854.272,- atau 98,97%.

3.3.16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Data, Statistik, dan Informasi adalah sebagaimana tercantum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2024, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

IKU ini merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode triwulanan. Berdasarkan Nota Dinas Biro Hukum Nomor 49/SJ.4/TU.210/I/2025, 4 Januari 2025, Pusdatin mendapatkan capaian senilai **100%**.



Tabel 46. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pada Tahun 2024 ini telah tersusun Keputusan Menteri tentang Data Induk Penyakit Ikan, dimana pokok materi muatannya adalah menetapkan struktur basis data dan data induk penyakit ikan, dan struktur basis data serta data induk penyakit ikan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan database penyakit ikan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum dengan Nomor 49/SJ.4/TU.210/I/2025, tanggal 4 Januari 2025. Capaian IKU dimaksud, adalah telah diterbitkannya dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Struktur Basis Data Penyakit Ikan dan Data Induk Penyakit Ikan yang dapat diunduh pada laman jdih.kkp.go.id.

Perbandingan capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP lingkup KKP, sebagai berikut:

Tabel 47. Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

No	Unit Kerja	Target Semester II		Capaian Semester II	
		Permen/ Kepmen	Persentase	Permen/ Kepmen	Persentase
1.	SET.DITJEN PKRL	8	100%	8	100%
2.	SET.DITJEN PT	4	100%	4	100%
3.	SET.DITJEN PB	2	100%	2	100%
4.	SET.DITJEN PDSPKP	3	100%	3	100%
5.	SET.DITJEN PSDKP	5	100%	5	100%
6.	SET.ITJEN	-	-	-	-
7.	SET. BPPSDMKP	5	100%	5	100%
8.	SET. BPPMHKP	2	100%	2	100%
9.	ROREN	3	100%	3	100%
10.	ROKEU-BMN	3	100%	3	100%
11.	ROSDMAO	1	100%	1	100%
12.	ROKUM	1	100%	1	100%
13.	ROHKLN	1	100%	1	100%
14.	ROUM-PBJ	-	100%	-	100%
15.	PUSDATIN	1	100%	1	100%



Gambar 32. Rapat Koordinasi Progsun Struktur Basis Data Penyakit Ikan dan Data Induk Penyakit Ikan

Untuk mendukung kegiatan IKU Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Penyempurnaan Peraturan dan Perjanjian Kerjasama Data, Statistik dan Informasi dengan anggaran senilai Rp 464.396.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 451.821.191,- atau 97,29%.

3.3.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin

Sebagai kontrol dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit per semester setiap tahunnya. Teknik menghitung indikator ini yaitu:

1. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil *review* Itjen terhadap Laporan Keuangan (LK) Semester II tahun berjalan (dengan batas waktu penyelesaian bulan September) dan LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian bulan Februari n+1), baik jumlah kejadian maupun nilai uang;
2. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian 7 hari kerja setelah diterimanya CATATAN HASIL PEMERIKSAAN), baik jumlah kejadian maupun nilai uang; dan
3. Bobot jumlah kejadian dengan nilai uang adalah 50% : 50%.

Tabel 48. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusdatin merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan. Berdasarkan memorandum Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 199/SJ.2/RC.610/I/2025, tanggal 16 Januari 2025, pada tahun 2024 Pusdatin mendapatkan nilai sebesar 100%. Perbandingan capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Sekretariat Jenderal:

Tabel 49. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Setjen Tahun 2024

No.	Eselon II	Jumah Temuan	Tindak Lanjut	Capaian (%)
1.	Biro Perencanaan	0	0	100,00
2.	Biro Keuangan	0	0	100,00
3.	Biro Umum dan PBJ	16	16	100,00
4.	Biro Hukum	0	0	100,00
5.	Biro SDMAO	0	0	100,00
6.	Biro HKLN	0	0	100,00
7.	Pusdatin	1	1	100,00
8.	LPMUKP	0	0	100,00
9.	BPISDKP	0	0	100,00
10.	Satker Dekon	0	0	100,00
SETJEN		17	17	100,00

Hal-hal yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU ini adalah:

1. Menyiapkan data dukung dalam rangka audit yang dilakukan oleh BPK Tahun 2024;
2. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti temuan BPK, dengan melengkapi data dukung rekomendasi hasil audit;
3. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan sebagai Tim Tindak Lanjut Lingkup Sekretariat Jenderal;
4. Monitoring kegiatan penyelesaian temuan BPK lingkup Pusdatin tahun sebelumnya;
5. Peningkatan kepatuhan satuan kerja mengirim laporan bulan secara tepat waktu secara *online*.



Gambar 33. Rapat Penyelesaian Temuan BPK



Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK pada Lingkungan Pusdatin melalui kegiatan Pelayanan Organisasi, Organisasi dan Rumah Tangga Pusdatin dengan anggaran senilai Rp 2.568.855.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 2.534.225.409,- atau 98,65%.

3.3.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin

Indeks profesionalitas (IP) ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Komponen IKU IP ASN terdiri dari:

1. **Kualifikasi (bobot 25%)** yaitu sesuai dengan pendidikan terakhir dari masing-masing pegawai:
2. **Kompetensi (bobot 40%)** terdiri dari:
 - a. Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);

- b. Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
 - c. Diklat 20 JP (Jam Pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua koma lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;
 - d. Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);
3. **Kinerja (bobot 30%)** merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 3600;
 4. **Disiplin (bobot 5%)** mengambil dari hukuman disiplin apakah sudah diterima atau belum, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinnya.
- Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN) Tahun 2024 Kategori dalam Pengukuran IP ASN yaitu:

Tabel 50. Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nilai	Kategori
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi

3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	0 - 60	Sangat Rendah

Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

- Kualifikasi bobot nilai 25:

Tabel 51. Kualifikasi bobot nilai 25 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	2 5	2 3	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	2 5	2 3	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	2 5	2 3	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLT A Sederajat	2 5	2 3	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLT A/ Sederajat	2 5	2 3	22	21	20	15
		DIII	2 5	2 3	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	2 5	2 3	20	15	10	5
		S2	2 5	2 0	15	10	5	1

- Kompetensi bobot nilai 40:

Tabel 52. Kualifikasi bobot nilai 40 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

- Kinerja bobot nilai 30:

Tabel 53. Kualifikasi bobot nilai 30 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Keterangan Nilai Kinerja ***)	Nilai Kinerja	Nilai
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30

2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

- Disiplin bobot nilai 5:

Tabel 54. Kualifikasi bobot nilai 5 Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN)

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Ringan</i>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Sedang</i>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Berat</i>	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir



Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Tabel 55. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi												
Nama IKU	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin												
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
-	83,47	85,36	85,79	90,50	85	90,13	106,04	-8,52	85	106,04	87	97,70	

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusdatin merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode semesteran. Berdasarkan  Nota Dinas Nomor: B.62/SJ.3/TU.140/I/2025 oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi dengan perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV Semester II Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025, pada triwulan IV Tahun 2024 mendapatkan capaian sebesar **90,13**. Berada pada peringkat ke-3 setelah Biro Hukum. Berikut adalah perbandingan capaian IKU Indeks profesionalitas (IP) ASN dengan Biro lingkup Setjen:

Tabel 56. Capaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Setjen Tahun 2024

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	12,5	30	5	72,5
2	Biro Perencanaan	21,84	33,5	26,63	5	86,97
3	Biro Keuangan	21,1	35,96	26,54	5	88,59
4	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	20,9	37,39	26,47	5	89,76
5	Biro Hukum	21,74	34,47	28,97	5	90,18
6	Biro HKLN	21,43	32,01	27,14	5	85,58
7	Biro Umum dan PBJ	20,72	36,92	25,19	5	87,83
8	Pusdatin	21,17	35,63	28,33	5	90,13
9	BPISKP	22,75	39,17	25	5	91,92
	Total	21,85	33,06	27,14	5	87,05 (Tinggi)

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU dimaksud, adalah:

1. Menyelenggarakan/mengikuti pelatihan-pelatihan secara *daring* dan *luring* untuk meningkatkan kompetensi SDM Pusdatin;
2. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) KKP/pemetaan SDM berdasarkan Analisa Jabatan;
3. Memberikan motivasi tugas belajar/ijin belajar kepada pegawai Pusdatin;
4. Penertiban pengisian SKP;
5. Penertiban LHKPN/LHKSN dengan sosialisasi dari Biro SDMAO;
6. Penentuan PIC untuk kelengkapan SKP dan LHKPN/LHKSN;
7. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis untuk Jabatan Fungsional lingkup Pusdatin, yaitu Pranata Komputer, Statistisi dan Surveyor Pemetaan serta mengidentifikasi Jabatan Fungsional Penata Perijinan di Denpasar pada Agustus 2024.

Sebagai tindaklanjut ke depan, agar IKU ini dapat tercapai, hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Menyelenggarakan pelatihan/Bimtek dan seminar secara daring secara kontinyu berdasarkan kompetensi dan kebutuhan;
2. Mengusulkan diklat fungsional untuk pejabat fungsional kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP;
3. Mengumpulkan dan menginput data dukung dari masing-masing pejabat dan pelaksana untuk meningkatkan nilai kompetensi SDM di lingkup Pusdatin;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.



Gambar 34. Koordinasi Kolaborasi dan Evaluasi JF Prakom, Statistisi dan Surveyor Pemetaan Lingkup KKP



Untuk mendukung kegiatan IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pusdatin melalui kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dengan anggaran senilai Rp 207.927.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 204.954.095,- atau 98,57%.

3.3.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Pusdatin merupakan penilaian terhadap jumlah

rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satuan Kerja Pusdatin berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawai.

Sedangkan cara pengukurannya yaitu jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh Satker Pusdatin yang menjadi objek pengawasan sebanyak minimal 95% dari seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal KKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 78/SJ.2/RC.610/I/2025, tanggal 8 Januari 2025 perihal Capaian IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2024, realisasi capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” periode Triwulan IV Tahun 2024 disampaikan bahwa Pusdatin telah menindaklanjuti secara tuntas sebanyak 11 rekomendasi dari 11 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti (jumlah rekomendasi 11) telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusdatin, maka capaian indikator dilaporkan sesuai target yaitu 95% sehingga persentase capaian menjadi 100%.

Tabel 57. Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No.	Unit Eselon II	Jumlah Rekom	TL (Tuntas)	Nilai Uang	TL (Tuntas)	Capaian IKU (100%)	Sisa Rekom
1.	Biro Perencanaan	21	21	-	-	100%	0
2.	Biro Keuangan dan BMN	36	36	-	-	100%	0
3.	Biro Umum dan PBJ	66	66	115.737.784	115.737.784	100%	0
4.	Biro Hukum	0	0	-	-	100%	0
5.	Biro SDMAO	7	7	-	-	100%	0
6.	Biro HKLN	18	18	-	-	100%	0
7.	Pusdatin	11	11	258.639	258.639	100%	0
8.	LPMUKP	17	17	-	-	100%	0
9.	BPISDKP	20	20	4.555.330	4.555.330	100%	0
SETJEN		196	196	120.551.753	120.551.753	100%	0

Tabel 58. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin											
REALISASI					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
100	100	100	100	100	95	100	105,26	5,26	100	105,26	100	100

Pada Tabel diatas dapat dilihat realisasi IKU Persentase Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin pada Tahun 2024 ini adalah **100%** dengan capaian 105,26%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasinya telah melebihi target Tahun 2024 sebesar 95%, disebabkan karena semua rekomendasi

hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin sudah dilaksanakan.

Kegiatan yang telah ditindaklanjuti untuk pencapaian IKU ini adalah:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan untuk penyelesaian dan tindaklanjut rekomendasi; dan
2. Memberikan data dukung rekomendasi dan saran hasil evaluasi/*review* dari Inspektorat Jenderal KKP.

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pusdatin melalui kegiatan Pelayanan Organisasi Koordinasi dan Rumah Tangga Pusdatin dengan anggaran senilai Rp 2.568.855.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 2.534.225.409,- atau 98,65%.

3.3.20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari Unit Kerja Level I dan II yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi Manajemen Pengetahuan.

Sejak Triwulan III Tahun 2023 terdapat perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan yang sudah mulai terintegrasi dalam *Portal Collaboration Office* pada laman <https://portal.kkp.go.id>, dimana Pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah Pejabat setingkat Eselon II karena belum semua unit kerja menetapkan Tim Kerja sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023. Dengan adanya perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan ini maka terdapat perubahan penilaian komponen penilaian Manajemen Pengetahuan. Adapun komponen penilaian Manajemen Pengetahuan yang baru adalah:

1. Keaktifan 100%;
2. Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4; dan



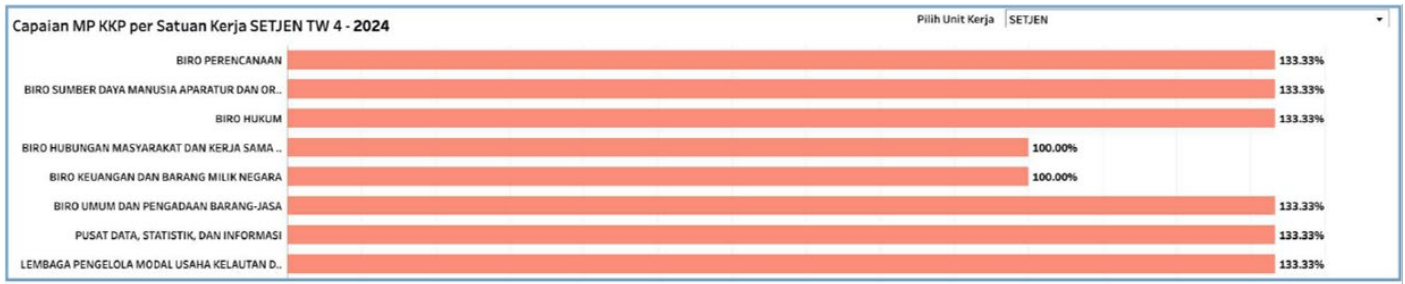
3. Pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon II.

Menindaklanjuti pengukuran capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin pada Tahun 2024 adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 59. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Pusdatin Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
91,14	96,06	95,59	98,32	133,33	94	133,33	141,84	-3.08	94	141,84	95	140,35

Berdasarkan Memorandum Pusdatin Nomor 32/SJ.7/TU.210/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024. Pada Tabel dapat dilihat bahwa realisasi Pusdatin dalam IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen pada Tahun 2024 adalah **133,33%**, yang menunjukkan bahwa capaian sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan IV Tahun 2023 kenaikannya adalah - 3.08%. Dari grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa capaian tertinggi dengan nilai 133,33% diperoleh Biro Perencanaan, Biro SDMAO, Biro Hukum, Biro Umum dan PBJ, Pusdatin, dan LPMUKP, sedangkan capaian terendah dengan nilai 100,00% pada Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Biro Keuangan.



Gambar 35. Capaian Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen Tahun 2024

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin adalah :

1. *Monitoring Portal Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan; dan
2. Meningkatkan kinerja *Helpdesk Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Unit Kerja Sekretariat Jenderal yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar melalui kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan dengan anggaran senilai Rp 35.320.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 35.248.850,- atau 99,80%.

3.3.21 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin

IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan capaian realisasi anggaran Pusdatin tahun 2024, dan merupakan hasil perhitungan capaian realisasi anggaran yang dibandingkan dengan pagu anggaran Pusdatin tahun 2024, yaitu **99,49%** sampai dengan bulan Desember 2024.

Tabel 60. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Triwulan IV Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV	Realisasi	% Capaian TW IV	% Kenaikan TW IV 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	99,45	99,15	95	99,49	104,73	-	95	104,73	96	-

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan. Berdasarkan **Memorandum** Nomor: 122/SJ.6/KU.520/I/2025, tanggal 10 Januari 2025 perihal Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 dari Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dengan perihal Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 capaian realisasi anggaran lingkup Pusdatin dari pagu efektif senilai **Rp 108,164,748,000** telah direalisasikan senilai **Rp 107,611,105,172** dengan persentase realisasi anggaran adalah sebesar **99,49%**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp 553,642,828**. Berikut perbandingan capaian Penyerapan Anggaran Pusdatin dengan Biro lain lingkup Setjen:

Tabel 61. Capaian Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran lingkup Setjenn Triwulan IV Tahun 2024

REALISASI ANGGARAN LINGKUP SATUAN KERJA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA TA. 2024

UNIT ESELON II	PAGU TOTAL	BLOKIR	PAGU EFEKTIF	REALISASI TERHADAP PAGU EFEKTIF			REALISASI TERHADAP PAGU TOTAL		
				REALISASI	SISA DANA	%	REALISASI	SISA DANA	%
Biro Perencanaan	279,952,553,000	13,087,980,000	266,864,573,000	252,862,971,730	14,001,601,270	94.75%	252,862,971,730	27,089,581,270	90.32%
Biro Keuangan dan BMN	17,059,764,000	4,421,933,000	12,637,831,000	12,581,275,160	56,555,840	99.55%	12,581,275,160	4,478,488,840	73.75%
Biro SDM Aparatur dan Organisasi	18,226,231,000	3,757,541,000	14,468,690,000	14,308,927,072	159,762,928	98.90%	14,308,927,072	3,917,303,928	78.51%
Biro Hukum	16,033,356,000	3,584,519,000	12,448,837,000	12,413,394,401	35,442,599	99.72%	12,413,394,401	3,619,961,599	77.42%
Biro Humas dan KLN	35,157,883,000	7,140,919,000	28,016,964,000	27,882,348,446	134,615,554	99.52%	27,882,348,446	7,275,534,554	79.31%
Biro Umum dan PBJ	332,849,012,000	6,039,819,000	326,809,193,000	325,922,532,400	886,660,600	99.73%	325,922,532,400	6,926,479,600	97.92%
Pusdatin	121,680,988,000	13,516,240,000	108,164,748,000	107,611,105,172	553,642,828	99.49%	107,611,105,172	14,069,882,828	88.44%
TOTAL	820,959,787,000	51,548,951,000	769,410,836,000	753,582,554,381	15,828,281,619	97.94%	753,582,554,381	67,377,232,619	91.79%

Catatan:

1. Pagu total merupakan keseluruhan pagu anggaran, termasuk blokir.
2. Pagu efektif merupakan pagu total dikurangi blokir.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini, adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;
2. Melakukan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu disampaikan kepada Bendara Keuangan;
3. Melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan anggaran;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan PBJ selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sebagai tindaklanjut ke depan, agar IKU ini dapat tercapai, hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang telah ditetapkan;
2. Mempercepat proses administrasi pertanggungjawaban keuangan; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan PBJ selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Untuk mendukung kegiatan IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusdatin melalui kegiatan Pelayanan Organisasi, Organisasi dan Rumah tangga Pusdatin dengan anggaran senilai Rp 2.568.855.000,- sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.534.225.409,- atau 98,65%.

3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan Pusdatin dengan DIPA Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp 121,680,988,000,- dan terdapat 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dan Pengelolaan Data dan Informasi (2329). Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dengan 2 Rincian Output (RO) yaitu (1) Layanan Umum dan (2) Layanan Perkantoran. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi (2329) masih menjadi kegiatan prioritas Pusdatin, dengan 3 Rincian Output (RO) yaitu (1) Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan; (2) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal; dan (3) Aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan; dan terdapat kegiatan Prioritas Nasional dengan Rincian Output (RO) yaitu Sistem



Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terintegrasi yang Operasional. Kedua program tersebut masuk ke dalam Program Dukungan Manajemen. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan AA/efisiensi anggaran senilai **Rp 13.516.240.000,- atau sebesar 11,11%** dari total pagu anggaran. Efisiensi anggaran tersebut, melalui kegiatan Layanan Umum, Layanan Data Statistik KP, Layanan Dukungan Manajemen Internal Internal, Sistem Informasi Pemerintahan dan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk penjelasan lebih rinci, alokasi pagu dan realisasi anggaran Pusdatin sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 62. Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Tahun 2024

Rincian Output (RO)	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran per 31 Desember 2024 (Rp)
		(Rp)	(%)	
Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	50.997.002.000	50.510.597.346	99,05	37.095.332.190
Pengelolaan Data dan Informasi	57.167.746.000	57.100.507.826	99,88	35.417.437.566
TOTAL	108,164,748,000	107,611,105,172	99,49	553,642,828



Untuk total pagu Anggaran Pusat Data Statistik dan Informasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 121.680.988.000,- blokir AA sampai akhir tahun senilai Rp 13.516.240.000,- atau 11,11 % dari total pagu Anggaran, sedangkan untuk pagu efektif senilai Rp 108.164.748.000,- dan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp 107.611.105.172,- atau 99,49 %.

Adapun sisa anggaran per 31 Desember senilai Rp 553.642.828,- sisa pagu efektif senilai Rp 13.516.240.000,- pagu blokir senilai Rp 14.069.882.828,- merupakan pagu total sisa anggaran dan efisiensi Pusdatin Tahun Anggaran 2024.



Gambar 36. Capaian Realisasi Anggaran Pusdatin Tahun 2024



4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2024 Pusdatin memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja terdapat 4 (empat) indikator yang capaiannya dinilai secara triwulan, 2 (dua) indikator yang dinilai secara semesteran, dan 15 (lima belas) indikator yang dinilai secara tahunan.

Berikut adalah capaian kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi pada Tahun 2024 berdasarkan aplikasi Kinerjaku:

1. Nilai Kinerja Organisasi Pusdatin pada aplikasi Kinerjaku di Tahun 2024 adalah **107.88**.
2. Terdapat terdapat 4 (empat) indikator yang capaiannya dinilai secara triwulan, 2 (dua) indikator yang dinilai secara semesteran, dan 15 (lima belas) indikator yang dinilai secara tahunan yaitu:
 - a. Tingkat kepatuhan pengelolaan data Kelautan dan Perikanan (**realisasi: 96,42% dan capaian: 105,96%**);
 - b. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen (**realisasi: 125% dan capaian : 132,98%**);
 - c. Indeks Layanan Aplikasi Sistem dan Teknologi Informasi (**realisasi: 4,11 dan capaian : 117,43%**);
 - d. Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (**realisasi: 98,95% dan capaian : 130,20%**);
 - e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (**realisasi: 3,99 dan capaian 130,82%**);
 - f. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (**realisasi: 80,78 dan capaian : 106,29%**);



- g. Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (**realisasi: 100% dan capaian: 111,11%**);
- h. Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (**realisasi: 3,4 dan capaian: 136%**);
- i. Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan menggunakan capaian pada tahun sebelumnya dikarenakan metode yang digunakan mengalami perubahan, sehingga tidak dapat dibandingkan. Nilai capaian IKU 2024 yang penilaiannya telah dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024 oleh Bappenas (**realisasi: 89,17% dan capaian: 127,39%**);
- j. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (**realisasi: 3 dan capaian: 100%**);
- k. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (**realisasi: 2,73 dan capaian: 99,27%**);
- l. Indeks Pelayanan Publik KKP (**realisasi: 4,8 dan capaian: 104,58%**);
- m. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (**realisasi: 90,15 dan capaian: 106,06%**);
- n. Survei Kepuasan Masyarakat KKP (**realisasi: 91,47 dan capaian : 103,59%**);
- o. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (**realisasi: 84,55 dan capaian: 100,65%**);
- p. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (**realisasi: 100% dan capaian: 100**);
- q. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Pusdatin (**realisasi: 100% dan capaian: 100**);
- r. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (**realisasi: 90,13 dan capaian: 106,04**);
- s. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (**realisasi: 100 dan capaian : 125%**);
- t. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin (**realisasi: 133,33% dan capaian : 141,84%**);



- u. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (**realisasi: 99,49% dan capaian: 104,73%**).
3. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan AA senilai **Rp 13,516,240,000** atau sebesar **11,11%** dari total pagu anggaran.
 4. Realisasi Penyerapan DIPA Pusdatin per 31 Desember tahun 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI dari pagu senilai **Rp 108,164,748,000** telah direalisasikan senilai **Rp 107,611,105,172** dengan persentase realisasi anggaran adalah sebesar **99,49%**, dengan sisa anggaran senilai **Rp 553,642,828**.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu :

1. Melakukan evaluasi terhadap IKU yang belum mencapai target, untuk bahan masukan dalam peningkatan IKU tahun yang akan datang;
2. Melakukan monitoring terhadap seluruh progres IKU sesuai dengan periode pengukurannya baik tahunan, semesteran dan triwulanan;
3. Meningkatkan penyerapan anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan; dan
4. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

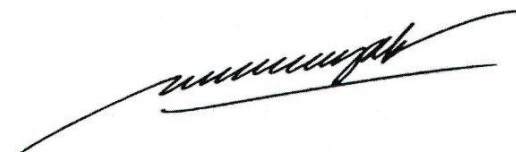
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal


Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data, Statistik,
dan Informasi


Aulia Riza Farhan


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91
		2	Persentase Unit Kerja Sekretariat Jenderal yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94
		3	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		4	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	76
		5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05
		6	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76
		7	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	76
		8	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,5
		9	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70
		10	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3
		11	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP (nilai)	2,75
		12	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59
		13	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85
		14	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data,	15	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84
		16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)	100



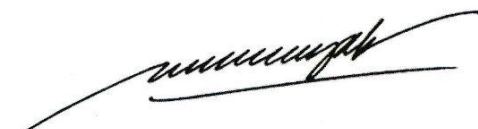
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Statistik, dan Informasi	17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100
	18 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85
	19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	80
	20 Persentase Unit Kerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94
	21 Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Data dan Informasi	
	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	62.474.420.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	
	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data, Statistik, dan Informasi	67.675.001.000
Total Anggaran Pusat Data Statistik dan Informasi Tahun 2024		130.149.421.000

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal


Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data, Statistik,
dan Informasi


Aulia Riza Farhan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama

Kepala Pusat Data, Statistik,
dan Informasi

Aulia Riza Farhan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91
		2	Persentase Unit Kerja Sekretariat Jenderal yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94
		3	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		4	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	76
		5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05
		6	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76
		7	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	90
		8	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,5
		9	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70
		10	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)	3
		11	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,75
		12	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59
		13	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85
		14	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data,	15	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84
		16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan (persen)	100
		17	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Statistik, dan Informasi	18	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85
		19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	95
		20	Persentase Unit Kerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	94
		21	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Data dan Informasi	
	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	62.474.420.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	
	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pusat Data, Statistik, dan Informasi	65.639.621.000
Total Anggaran Pusat Data Statistik dan Informasi Tahun 2024		128.114.041.000

Jakarta, 23 Oktober 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal


Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data, Statistik,
dan Informasi


Aulia Riza Farhan



PENGHARGAAN

1. Penghargaan Pusdatin sebagai unit penanganan pengaduan terbaik II Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan



2. Bhumandala Atas keikutsertaannya dalam rangka penghargaan Bhumandala Kinerja Sampul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat KANAKA





PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN